



# **LAPORAN KINERJA**

## **INSTANSI**

## **PEMERINTAH**

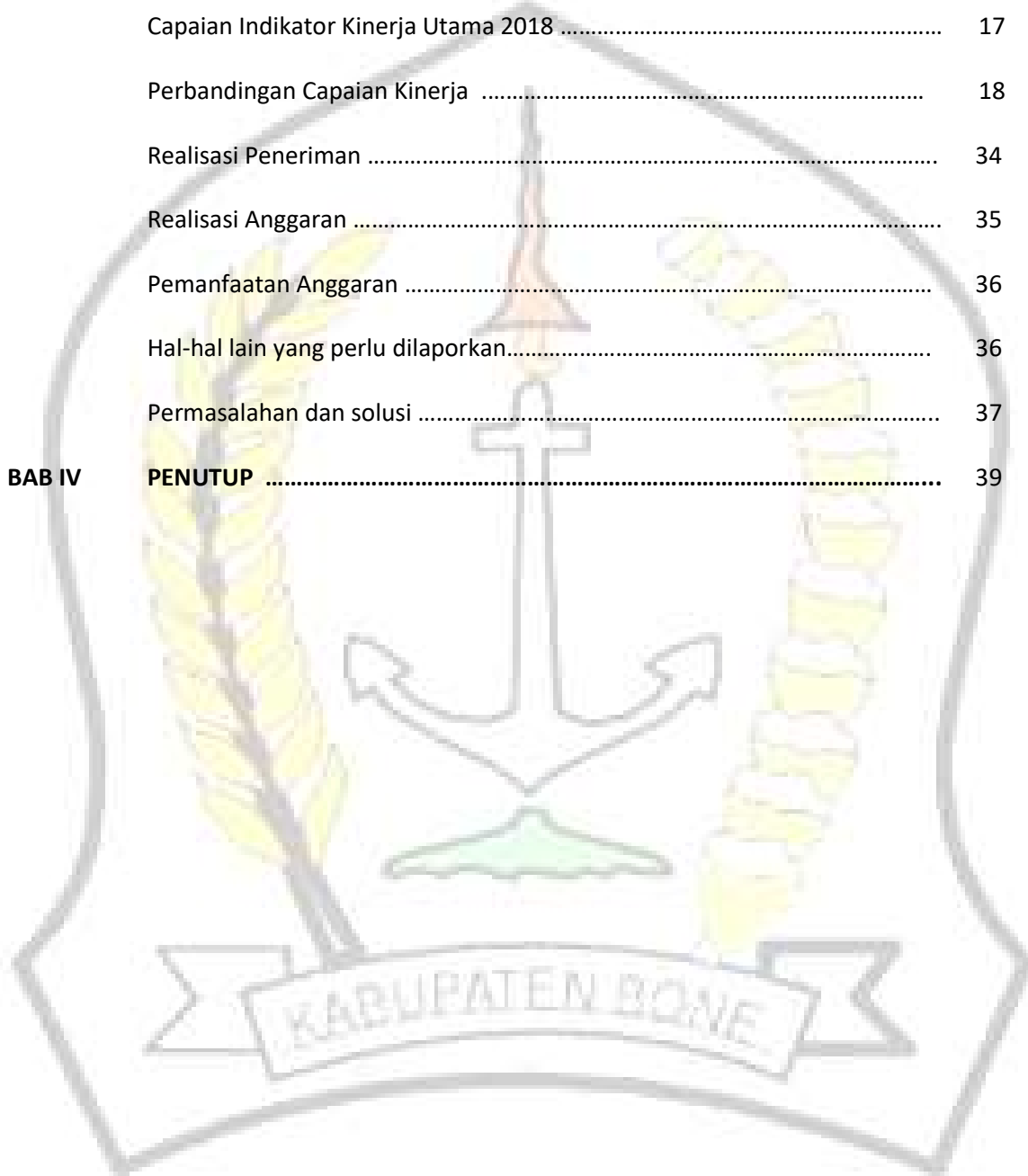
## **TAHUN 2018**



# DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	<i>i</i>
DAFTAR ISI .....	<i>iii</i>
DAFTAR LAMPIRAN .....	<i>v</i>
DAFTAR TABEL & GAMBAR .....	<i>vi</i>
<b>BAB I      PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
Latar Belakang .....	1
Maksud dan Tujuan .....	2
Gambaran umum Organisasi .....	2
Isu Strategis .....	6
Inovasi Pelayanan Publik .....	7
<b>BAB II      PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>8</b>
Rencana Strategis .....	8
Visi .....	8
Misi .....	9
Tujuan Dan Indikator Kinerja .....	9
Sasaran Dan Indikator Kinerja .....	10
Program Strategis Untuk Pencapaian Kinerja .....	10
Perjanjian Kinerja Tahun 2018 .....	11
Indikator Kinerja Utama .....	12
Rencana Anggaran .....	13

<b>BAB III</b>	<b>AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>16</b>
	Capaian Kinerja Organisasi .....	16
	Capaian Indikator Kinerja Utama 2018 .....	17
	Perbandingan Capaian Kinerja .....	18
	Realisasi Penerimaan .....	34
	Realisasi Anggaran .....	35
	Pemanfaatan Anggaran .....	36
	Hal-hal lain yang perlu dilaporkan.....	36
	Permasalahan dan solusi .....	37
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>39</b>



# DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

<b>LAMPIRAN I</b>	PERJANJIAN KINERJA Tahun 2018 .....	42
<b>LAMPIRAN II</b>	REALISASI PENERIMAAN PAD TAHUN 2018 & PENINGKATAN PENERIMAAN PAD TAHUN 2013-2018	43
<b>LAMPIRAN III</b>	REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2018	44
<b>LAMPIRAN IV</b>	REALISASI PENERIMAAN PAD TAHUN 2018 YANG DIKELOLA BAPENDA	45
<b>LAMPIRAN V</b>	PROGRAM DAN KEGIATAN PENUNJANG KINERJA .....	46
<b>LAMPIRAN VI</b>	REALISASI ANGGARAN BAPENDA TAHUN 2018	47
<b>LAMPIRAN VII</b>	CASCADING BAPENDA TAHUN 2018 .....	48

## DAFTAR GAMBAR & TABEL

	Halaman
Gambar 1	Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone 5
Gambar 2	Dokumentasi kegiatan Penunjang Kinerja Sasaran 50
Tabel 1.1	SDM Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone Tahun 2018 6
Tabel 2.1	Tujuan dan Indikator Kinerja Badan Pendapatan Daerah 9
Tabel 2.2	Sasaran dan Indikator Kinerja Badan Pendapatan Daerah 10
Tabel 2.3	Program untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2018 11
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone 11
Tabel 2.5	IKU Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone 12
Tabel 2.6	Anggaran Belanja Badan Pendapatan Daerah 13
Tabel 2.7	Alokasi Anggaran per sasaran Tahun Anggaran 2018 14
Tabel 3.1	Skala Pengukuran Ordinal 16
Tabel 3.2	Pencapaian Indikator Sasaran 16
Tabel 3.3	Capaian Indikator Kinerja Bapenda 17
Tabel 3.4	Persentase Kategori Pencapaian Indikator Sasaran 18
Tabel 3.5	Capaian Indikator Kinerja 19
Tabel 3.5.1	Peningkatan Penerimaan PAD 20
Tabel 3.5.2	Capaian Indikator Kinerja 21
Tabel 3.6	Perkembangan Capaian Indikator Kinerja 22
Tabel 3.7	Capaian Kinerja Tahun 2018 terhadap Target Jangka Mengengah (Renstra) Tahun 2013-2018 23
Tabel 3.7.1	Data Realisasi dan Pembangunan Pasar Kecamatan 25
Tabel 3.8	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya I 28
Tabel 3.11	Realisasi Keuangan Bapenda 2018 35
Tabel 3.12	Capaian IKU Bapenda 37

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone Tahun 2018 dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2018.

Laporan Kinerja (LKj) Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone Tahun 2018 merupakan capaian akuntabilitas kinerja pada tahun keempat dalam masa RENSTRA Tahun 2013.-2018 LKj Tahun 2018 disusun berdasarkan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2018 yang dijabarkan dari Rencana Strategis (RENSTRA Tahun 2013-2018).

LKj Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2016. Penyusunan LKj Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone Tahun 2018 merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone. Komitmen dalam penyusunan LKj Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone, bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya.

Cakupan LKj Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone Tahun 2018 terdiri atas : Pendahuluan, Perencanaan & Perjanjian Kinerja, Akuntabilitas Kinerja dan inovasi dalam skema reformasi birokrasi. Pendahuluan memiliki muatan uraian singkat organisasi, seperti : latar, maksud, isu strategis, dan struktur serta keragaman sumberdaya manusia di Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone. Adapun aspek Perencanaan dan Perjanjian Kinerja menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, IKU dan PK. Sedangkan aspek akuntabilitas kinerja, memberikan gambaran capaian, analisa, dan evaluasi terhadap indikator kinerja utama Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone pada tahun 2018, termasuk atas analisa efisiensi penggunaan sumberdaya.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas-tugas Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone Tahun 2018 telah banyak membuahkan hasil yang positif. Dari 4 indikator kinerja utama terdapat 3 indikator telah memenuhi target yang ditetapkan dan mengalami peningkatan namun peningkatannya belum menunjukkan angka-angka yang berarti bila dibanding dengan tingkat

kebutuhan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di kabupaten Bone. Namun disadari, masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Analisa dan evaluasi atas capaian kinerja secara komprehensif digunakan sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan pelayanan dan mendukung tercapainya good governance pada masa mendatang. Berkenaan dengan itu, LKj Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone Tahun 2018 ini, dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Terima kasih

Watampone, 15 Februari 2019

**KEPALA BAPENDA KAB. BONE**



**A. HERMAN, SH, MH**

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip. : 19620724 199003 1 008





# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj dilakukan dengan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone.

Proses penyusunan LKj dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone. LKj menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2017, LKj tingkat SKPD disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

## **1.2 MAKSUD DAN TUJUAN**

LKj Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun secara sistematis dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKj juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

LKj Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone merupakan proses untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran yang selanjutnya dianalisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKj, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKj sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

## **1.3 GAMBARAN UMUM ORGANISASI**

### **1.3.1 TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. BONE**

Badan Pendapatan Daerah kab. Bone sebagai salah satu perangkat daerah penyelenggara urusan pemerintahan daerah bidang pendapatan daerah, dibentuk berdasarkan :

- *Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.*
- *Peraturan Daerah Kab. Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah .*

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone diatur dalam Peraturan Bupati Bone Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone,. Tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone yaitu sebagai berikut:

a. Tugas Pokok Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone

Melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang pendapatan daerah yang menjadi kewenangan daerah.

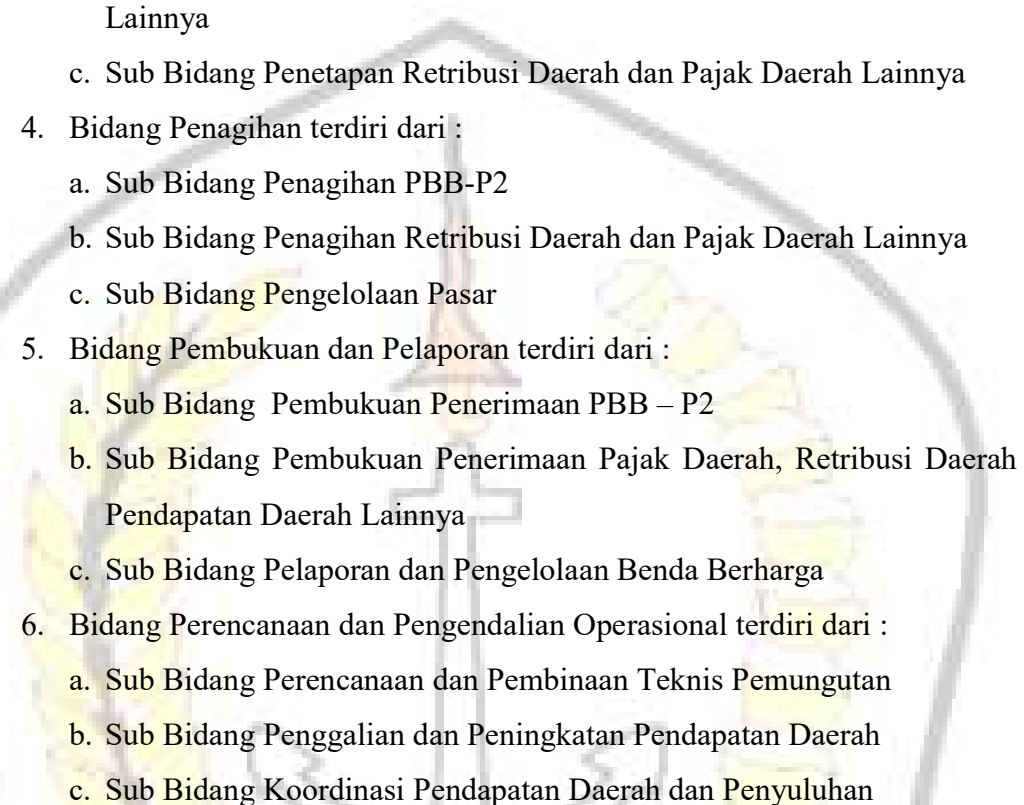
b. Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone

1. Perumusan kebijakan penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan daerah ;
2. Pelaksanaan kebijakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan daerah ;
3. Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan daerah ;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan daerah ; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Struktur Organisasi

Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone memiliki susunan organisasi sebagai berikut :

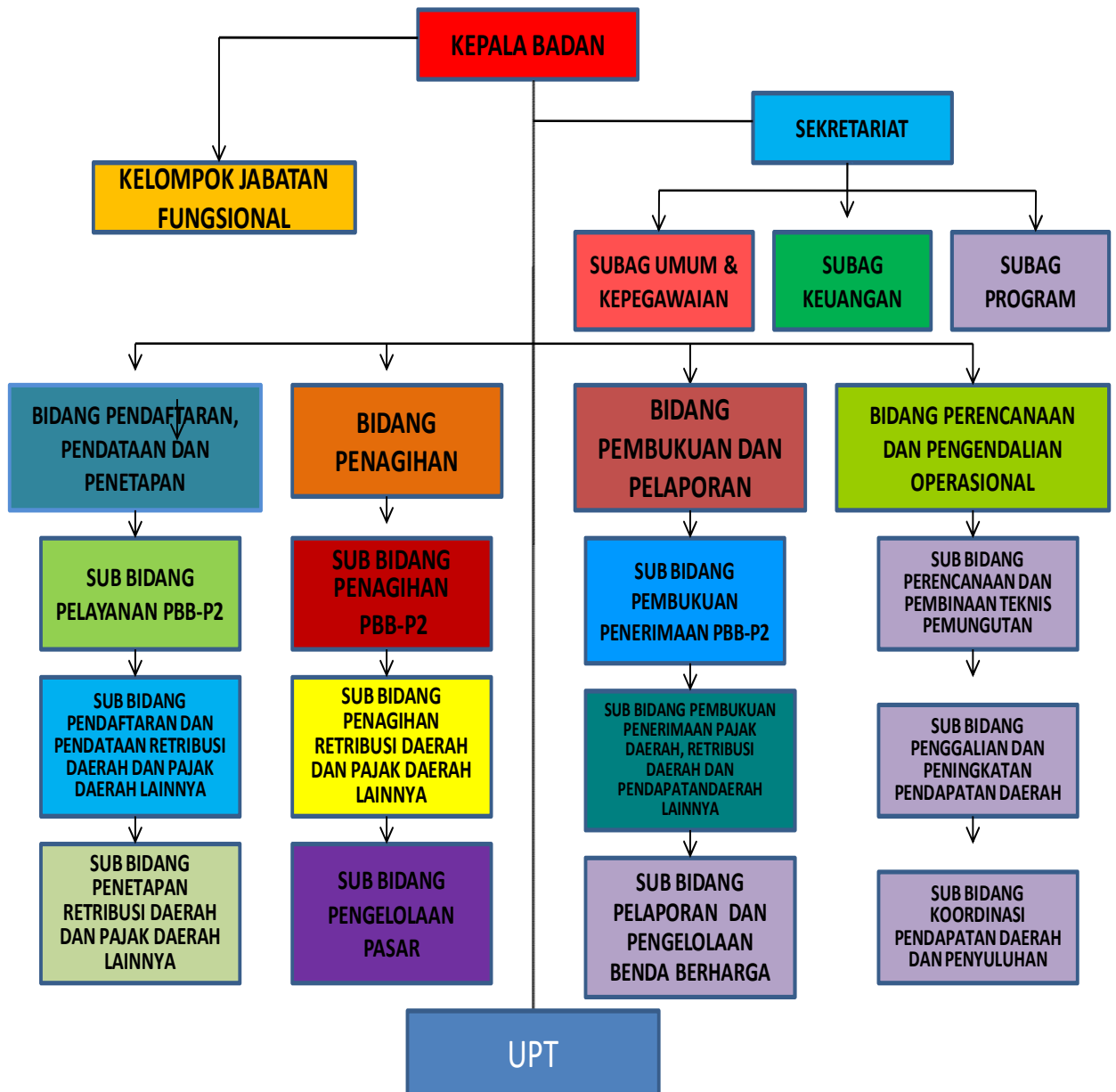
1. Kepala Badan
2. Sekretaris
  - a. Sub bagian Umum dan Kepegawaian
  - b. Sub bagian Keuangan
  - c. Sub bagian Program

- 
3. Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan terdiri dari :
    - a. Sub Bidang Pelayanan PBB-P2
    - b. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Lainnya
    - c. Sub Bidang Penetapan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Lainnya
  4. Bidang Penagihan terdiri dari :
    - a. Sub Bidang Penagihan PBB-P2
    - b. Sub Bidang Penagihan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Lainnya
    - c. Sub Bidang Pengelolaan Pasar
  5. Bidang Pembukuan dan Pelaporan terdiri dari :
    - a. Sub Bidang Pembukuan Penerimaan PBB – P2
    - b. Sub Bidang Pembukuan Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya
    - c. Sub Bidang Pelaporan dan Pengelolaan Benda Berharga
  6. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional terdiri dari :
    - a. Sub Bidang Perencanaan dan Pembinaan Teknis Pemungutan
    - b. Sub Bidang Penggalan dan Peningkatan Pendapatan Daerah
    - c. Sub Bidang Koordinasi Pendapatan Daerah dan Penyuluhan

Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone sebagai berikut :

Gambar 1

## STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. BONE



Susunan kepegawaian dan jumlah personil di Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone sebagai berikut :

**Tabel 1.1**  
**SDM Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone Tahun 2018**

No.	Pendidikan	Jumlah	No.	Gol.	Jumlah	No.	Jabatan	Jumlah
1.	SD	-	1.	I	1	1.	Struktural	21
2.	SMP	2	2.	II	18	<i>Eselon II = 1 Orang</i> <i>Eselon III = 5 Orang</i> <i>Eselon IV = 15 Orang</i>		
3.	SMA	18	3.	III	43			
4.	Sarmud/ D3	-	4.	IV	8			
5.	Strata 1	44				2.	Pelaksana	49
6.	Strata 2	6						
<b>Jumlah</b>		<b>70</b>	<b>Jumlah</b>		<b>70</b>	<b>Jumlah</b>		<b>70</b>

#### 1.4 ISU STRATEGIS

Isu Strategis yang dihadapi Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone yang dituangkan dalam Renja tahun 2018 adalah :

1. Belum optimalnya pemungutan Pajak dan Retribusi ;
2. Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung Operasional dalam meningkatkan Sumber – Sumber Pendapatan Asli Daerah ;
3. Masih terbatasnya tenaga teknis di bidang Akuntansi, Penyidik Pajak Daerah, Juru sita dan Tenaga Penyuluh Pajak dan Retribusi Daerah ;
4. Masih rendahnya kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak dan Retribusi Daerah ;
5. Belum Optimal Penegakan hukum, atau sanksi atas pelanggaran ketentuan perpajakan ;
6. Masih lemahnya pengawasan Retribusi Daerah.

## 1.5 INOVASI PELAYANAN PUBLIK

Inovasi menjadi kunci dalam reformasi birokrasi dan perbaikan kinerja pelayanan publik, oleh karena itu berbagai inovasi juga telah dikembangkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone. Salah satu inovasi yang dikembangkan adalah ***“Pelayanan PBB-P2 Tidak Susahji ( Pelayanan PBB-P2 dengan metode jemput antar)”*** merupakan bentuk pemberian Pelayanan Prima ke masyarakat untuk memudahkan masyarakat Wajib Pajak PBB-P2 ( Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ). Dalam pengurusan PBB-P2 Bapenda Kab. Bone menyiapkan petugas pelayanan untuk menjemput berkas permohonan dan mengantarkan kembali ke Wajib Pajak apabila telah selesai proses administrasinya.



## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1 RENCANA STRATEGIS**

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013-2018 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone 2013-2018. Rencana Strategis (RENSTRA) sebagai dokumen perencanaan yang memuat penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran dan program SKPD selama 5 tahun yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Sinkronisasi dokumen perencanaan ini diarahkan untuk mendukung pencapaian Visi Pembangunan oleh Bupati Bone terpilih sebagaimana telah ditetapkan dalam Dokumen RPJMD Kab. Bone Periode Tahun 2013-2018, yaitu :

***“ MASYARAKAT BONE YANG SEHAT, CERDAS DAN SEJAHTERA ”***

Sejalan dengan Visi Bupati Bone tersebut di atas dan mengacu pada tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah kab. Bone, maka di dalam Renstra Tahun 2013-2018 ditetapkan Visi dan Misi serta tujuan Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone

##### **2.1.1 VISI :**

Visi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone adalah

***“TERWUJUDNYA INSTANSI YANG PROFESIONAL DALAM  
PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH YANG OPTIMAL, EFISIEN,  
EFEKTIF”.***

Visi ini mengandung frase optimal, efisien, efektif dan akuntabel. Rincian Frase ini adalah sebagai berikut :

1. Instansi yang professional adalah instansi yang memiliki kompetensi dalam pengelolaan keuangan daerah, kreatif dan inovatif dalam pengembangan pendapatan daerah untuk membangun Bone yang sejahtera.



2. Optimal artinya mengelola sumber-sumber pendapatan daerah dengan memperkuat sumber-sumber yang telah ada dan menggali, serta mengembangkan sumber-sumber pendapatan yang belum terolah dengan memanfaatkan SDM yang ada.
3. Efisien adalah pengelolaan sumber-sumber pendapatan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang sesuai kebutuhan untuk mendapatkan hasil yang optimal.
4. Efektif adalah pengelolaan sumber-sumber pendapatan pada situasi dan kondisi waktu yang telah ditetapkan mampu meraih hasil sesuai dengan target dan harapan pemerintah daerah.

### 2.1.2 MISI:

Dengan Misi, yaitu sebagai berikut :

***Mewujudkan Peningkatan Pendapatan Daerah melalui Peningkatan Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah.***

### 2.1.3 TUJUAN DAN INDIKATOR KINERJA

Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah :

*Misi : Mewujudkan peningkatan pendapatan daerah melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah.*

*Tujuan : Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah.*

Indikator Kinerja dan target kinerja untuk tujuan diuraikan dalam tabel berikut ini :

*Tabel 2.1  
Tujuan dan Indikator Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone*

TUJUAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET AKHIR RENSTRA
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah.	Persentase Kenaikan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	%	6,17 %	9,51 %

#### 2.1.4 SASARAN

Mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan adalah sebagai berikut:

*Tujuan : Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah.*

*Sasaran : Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.*

Indikator Kinerja dan target kinerja sasaran strategis diuraikan dalam tabel berikut ini :

*Tabel 2.2  
Sasaran dan Indikator Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone*

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET AKHIR RENSTRA
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Realisasi PAD terhadap pencapaian Target	%	100	100
	Persentase Kenaikan PAD	%	10	50
	Persentase Capaian Pajak Daerah	%	100	100
	Persentase Capaian Retribusi Daerah	%	100	100

#### 2. 1.5 PROGRAM UNTUK PENCAPAIAN SASARAN

Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program. Adapun program-program untuk mendukung masing-masing sasaran tahun 2018 sebagai berikut:

*Tabel 2.3*  
*Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2018*

SASARAN	PROGRAM PENDUKUNG
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah .	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

## 2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja beserta program dan anggaran. Penyusunan PK 2018 dilakukan dengan mengacu kepada RENSTRA, RENCANA KERJA (RENJA) 2018, IKU dan APBD.

Sebagai wujud komitmen Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone dalam pencapaian target kinerja tahunan yang telah tercantum dalam Renja/RKT Tahun 2018, maka telah ditetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 yang ditanda tangani bersama oleh Kepala Bapenda Kab. Bone bersama dengan Bapak Bupati Bone ( sebagaimana terlampir pada *Lampiran I*)

Ringkasan atau ikhtisar Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone Tahun 2018 sebagai berikut:

*Tabel 2.4*  
*Perjanjian Kinerja Bapenda Kab. Bone Tahun 2018*

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2018
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Realisasi PAD terhadap pencapaian Target	%	100
	Persentase Kenaikan PAD	%	10
	Persentase Capaian Pajak Daerah	%	100
	Persentase Capaian Retribusi Daerah	%	100

## 2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi pada tahun 2018 Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone telah menetapkan IKU berdasarkan Peraturan Bupati Bone No..... Tahun 2018 sebagai berikut:

*Tabel 2.5*  
*IKU Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone*

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah .	Persentase Realisasi PAD terhadap pencapaian target	%	$\frac{\text{Jumlah Realisasi PAD}}{\text{Jumlah Target PAD}} \times 100$	Laporan Realisasi Pendapatan Daerah
	Persentase Rata-Rata Kenaikan PAD	%	$\frac{\text{Realisasi PAD Thn ini} - \text{Realisasi PAD Tahun lalu}}{\text{Realisasi PAD Tahun Lalu}} \times 100$	Laporan Realisasi Pendapatan Daerah
	Persentase Capaian Pajak Daerah	%	$\frac{\text{Jumlah Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Jumlah Target Pajak Daerah}} \times 100$	Laporan Realisasi Pendapatan Daerah
	Persentase Capaian Retribusi Daerah	%	$\frac{\text{Jumlah Realisasi Retribusi Daerah}}{\text{Jumlah Target Retribusi Daerah}} \times 100$	Laporan Realisasi Pendapatan Daerah

## 2.4 RENCANA ANGGARAN TAHUN 2018

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran ( DPPA ) Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone pada Tahun 2018, maka jumlah pendanaan yang dianggarkan untuk mendukung pencapaian target capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone pada Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp. 15.722.158.077,- . Nilai anggaran ini bersumber dari Dana Alokasi Umum ( DAU ) APBD Kab. Bone Tahun Anggaran 2018 yang digunakan untuk membiayai Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Secara rinci rencana anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

*Tabel 2.6*  
*Anggaran Belanja Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone TA 2018*

No	Uraian	Pagu Anggaran Sebelum dan Setelah Perubahan	
		DPA No. 33 Tahun 2017 Tgl. 28 Desember 2017	DPPA No. 05 Tahun 2018 Tgl. 11 Oktober 2018
<b>1</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>Rp. 7.031.423.100,-</b>	<b>Rp. 7.972.158.077,-</b>
	- Gaji dan Tunjangan	Rp. 4.094.622.100,-	Rp. 4.165.357.077,-
	- Tambahan Penghasilan PNS	-----	Rp. 300.000.000,-
	- Biaya Pemungutan Pajak Daerah	Rp. 544.824.000,-	Rp. 394.824.000,-
	- Insentif Pemungutan Pajak Daerah	Rp. 1.884.052.600,-	Rp. 2.314.052.600,-
	- Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	Rp. 507.924.400,-	Rp. 797.924.400,-
<b>2</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>Rp. 7.650.000.000,-</b>	<b>Rp. 7.750.000.000,-</b>
	- Belanja Pegawai	Rp. 288.420.000,-	Rp. 225.594.000,-
	- Belanja Barang dan Jasa	Rp. 6.817.880.000,-	Rp. 6.945.456.000,-
	- Belanja Modal	Rp. 543.700.000,-	Rp. 578.950.000,-
<b>Jumlah</b>		<b>Rp. 14.681.423.100,-</b>	<b>Rp. 15.722.158.077,-</b>

Anggaran belanja langsung sebelum perubahan Rp. 7.650.000.000,- untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2018 yang terdiri dari 9 Program dan 32 kegiatan sesuai yang direncanakan dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018, akan tetapi setelah perubahan menjadi 8 Program dan 31 kegiatan dikarenakan program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi tidak terlaksana, hal ini disebabkan karena tidak adanya kegiatan penyelenggaraan Pameran Investasi untuk tahun 2018 sehingga anggaran tersebut dialihkan pada program lain.

Anggaran belanja langsung setelah perubahan senilai Rp. 7.750.000.000,- digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan terdiri dari 8 Program dan 31 Kegiatan dengan pengalokasian terhadap pencapaian sasaran, adalah sebagai berikut :

*Tabel 2.7*  
*Alokasi Anggaran per Sasaran Tahun Anggaran 2018*

SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	%
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	1.Persentase Realisasi PAD terhadap pencapaian Target	1.Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	4,479,726,000,-	57,80
	2.Persentase Kenaikan PAD.			
	3.Persentase Capaian Pajak Daerah	2.Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	120,175,000,-	1,55
	4.Persentase Capaian Retribusi Daerah	3.Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	1,073,941,000,-	13,85

SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
Program Rutin Pendukung Program Strategis dalam Pencapaian Seluruh Sasaran --->>	4. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	955.187.000,-	12,32
	5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	846.495.000,-	10,92
	6. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	43.500.000,-	0,56
	7. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	10.976.000,-	0,14
	8. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	220.000.000,-	2,83
<b>TOTAL</b>		<b>7.750.000.000,-</b>	<b>100</b>

Pada tabel di atas, jumlah anggaran untuk program/kegiatan sebesar Rp. 7.750.000.000,- . Dari total 8 Program, 3 diantaranya adalah program prioritas yang secara strategis sangat menentukan pencapaian target indikator kinerja sasaran Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone, dan 5 program lainnya merupakan program rutin yang dilaksanakan untuk pencapaian seluruh sasaran yang ada. Persentase terbesar anggaran untuk mendukung sasaran Meningkatnya Pendapatan Daerah dengan besaran 73,20 % dari total anggaran belanja langsung.

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal dengan pendekatan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai berikut :

*Tabel 3.1*  
*Skala Pengukuran Ordinal*

NO	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	>100 %	Baik Sekali
2	$76 \% \leq 100\%$	Baik
3	$66 \% \leq 75 \%$	Cukup
4	$51 \% \leq 65 \%$	Kurang
5	$\leq 50\%$	Sangat Kurang

Secara umum Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai sasaran dan indikator yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone Tahun 2013–2018. Dalam Renstra terdapat 1 sasaran dengan 4 indikator sasaran.

*Tabel 3.2*  
*Pencapaian Indikator Sasaran*

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Pencapaian Indikator Sasaran
1.	1	4	BS = 3      B = 1      SK = C =          K =
	JUMLAH	4	BS = 3      B = 1      SK = C =



### 3.1.1 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 2018

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Pemilihan dan Penetapan Indikator Kinerja Utama harus memenuhi karakteristik yaitu spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur dan dapat dikuantifikasi dan diukur. Rincian tingkat capaian sasaran yang telah ditetapkan dengan melihat tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja diuraikan pada table berikut :

**Tabel 3.3**  
**Capaian Indikator Kinerja**  
**Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone Tahun 2018.**

<b>No</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
1.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah .	Persentase Realisasi PAD terhadap pencapaian Target	100	107,41	107,41
		Persentase Kenaikan PAD	10	11,69	116,9
		Persentase Capaian Pajak Daerah	100	123,06	123,06
		Persentase Capaian Retribusi Daerah	100	87,52	87,52

Dari 1 sasaran dengan 4 indikator kinerja utama sasaran dapat dijelaskan pencapaian indikator sasaran kinerja Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

Tabel 3.4  
Persentase Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

No.	Kategori	Jumlah Indikator Sasaran	Persentase (%)
<b>Sasaran 1</b>			
1.	Baik Sekali	3	347,37
2.	Baik	1	87,52
3.	Cukup		
4.	Kurang		
5.	Sangat Kurang		
	<b>Jumlah</b>	<b>4</b>	<b>108,72</b>

Berdasarkan persentase kategori pencapaian indikator sasaran tersebut di atas, secara umum realisasi capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone, telah memenuhi target kinerja dengan kategori **Baik sekali** dimana persentase rata-rata capaian kinerjanya sebesar 108,72 %.

### 3.1.2 PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA

Pelaksanaan program/kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone tahun 2018 sesuai dengan penetapan kinerja yang telah dilakukan, maka untuk mengevaluasi sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dapat diketahui dengan melihat indikator-indikator yang terkait dengan sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Berdasarkan format Pengukuran Kinerja yang telah dibuat dengan merujuk pada Indikator Kinerja Utama dan RPJMD instansi maka capaian Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2018 dari Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone dapat dijelaskan melalui uraian tiap sasaran berikut di bawah ini:

## Sasaran : Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah

### a. Perbandingan *Antara Target dan Realisasi*

**Tabel 3.5**  
**Capaian Indikator Kinerja**

No.	Indikator Kinerja	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian Kinerja
a.	Persentase Realisasi PAD terhadap pencapaian Target	100	107,41	107,41
b.	Persentase Kenaikan PAD	10	( 23,61 )	(236,1)
c.	Persentase Capaian Pajak Daerah	100	123,06	123,06
d.	Persentase Capaian Retribusi Daerah	100	87,52	87,52

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator utama 1 yaitu *Persentase Realisasi PAD terhadap pencapaian Target*, dengan capaian Rp. 214.246.216.580,41 (**telah melebihi target**) yang telah ditetapkan. Realisasi pada tahun 2018 mencapai Rp.214.246.216.580,41, dari target Rp. 199.472.831.779,00 dengan persentase 107,41 % Capaian ini dikategorikan (Sangat Baik).

Rincian Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kab. Bone Tahun 2018 yang dikelola oleh OPD sebagaimana terlampir pada **Lampiran II**.

Realisasi pada indikator kinerja utama 2 yaitu *Persentase Kenaikan PAD*, dengan capaian (236,1) % (**kurang dari target**) yang telah ditetapkan. Realisasi Penerimaan PAD Tahun 2018 tercapai sebesar Rp. 214.246.216.580,41 ( data sebelum audit BPK) terdapat penurunan sebesar Rp. 66.231.882,905,05 atau (23,61) % dari Realisasi Penerimaan PAD Tahun 2017 yang dicapai sebesar Rp. 280.478.099.485,46. Capaian ini dikategorikan (Sangat Kurang). Penurunan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) Tahun 2018 disebabkan karena pada pos Lain-lain PAD yang Sah terdapat penurunan sebesar Rp. 79.988.092.865 atau (36,98) % dari semula pada Tahun 2017 dicapai

sebesar Rp. 216.289.485.975 menjadi Rp.136.301.393.110 pada Tahun 2018. Hal ini disebabkan Karena adanya pengalihan penempatan pos/rekening penerimaan Pendapatan Dana Transfer (Dana Bos) yang semula pada Tahun 2017 ditempatkan pada pos/rekening penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah, yang pada Tahun 2018 beralih penempatan ke pos penerimaan Lain-lain Pendapatan Yang sah berdasarkan Permendagri No. 33 tahun 2017 tentang pedoman Penyusunan APBD Tahun 2018.

Disisi lain apabila penempatan pos/rekening penerimaan Dana Bos ini tidak dimasukkan ke dalam penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah maka ***Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2018 mengalami peningkatan dibanding Tahun 2017 sebesar 11,69 %***. Secara Rinci perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2017 dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2018 setelah Dana Bos dikeluarkan dapat dilihat pada tabel di bawah ini .

***Tabel 3.9***

***Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah***

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Capaian Kinerja
1.	Pajak Daerah	44,726,076,045.25	51,271,353,220	14,63 %
2.	Retribusi Daerah	12,734,571,559.00	19,652,213,419	54,32 %
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	6,727,965,905.22	7,055,937,640	4,87 %
4.	Lain-lain PAD yang Sah	127,638,285,976	136,301,393,110	6,79 %
	- Dana Bos	88,651,200.000	-	
	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>191,826,899,485.46</b>	<b>214.246.216.580,41</b>	<b>11,69 %</b>

Rincian Penerimaan Pendapatan Daerah Kab. Bone Tahun 2018 sebagaimana terlampir pada ***Lampiran III***.

Dari penjelasan tersebut di atas dilakukan koreksi terhadap capaian indikator

kinerja pada Tabel 3.5 sebelumnya sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.5**  
**Capaian Indikator Kinerja**

No.	Indikator Kinerja	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian Kinerja
a.	Persentase Realisasi PAD terhadap pencapaian Target	100	107,41	107,41
b.	Persentase Kenaikan PAD ( Setelah dana bos dikeluarkan)	10	11,69	116,9
c.	Persentase Capaian Pajak Daerah	100	123,06	123,06
d.	Persentase Capaian Retribusi Daerah	100	87,52	87,52

Realisasi target pada indikator utama 3 yaitu *Persentase Capaian Pajak Daerah* dengan capaian Rp.51.236.484.457,- (**telah melebihi target**) yang telah ditetapkan. Realisasi pada tahun 2018 mencapai Rp. 51.236.484.457,- dari target Rp. 41.636.794.167,- dengan persentase 123,06 % Capaian ini dikategorikan (**Sangat Baik**).

Realisasi target pada indikator utama 4 yaitu *Persentase Capaian Retribusi Daerah* dengan capaian Rp.19.652.213.419,- (**kurang dari target**) yang telah ditetapkan. Realisasi pada tahun 2018 mencapai Rp. 19.652.213.419,- dari target Rp.22.455.566.712,- dengan persentase 87,52 % Capaian ini dikategorikan (**Baik**). Tidak tercapainya target Retribusi Daerah dari yang direncanakan sebesar Rp. 22.455.566.712 terealisasi sebesar Rp. 19.652.213.419 atau 87,52 % disebabkan karena tidak tercapainya target penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pasar , Retribusi Terminal dan Retribusi pemakaian kekayaan daerah.

- Ketidakberhasilan pencapaian target pada indikator kinerja utama 4 yaitu *Persentase Capaian retribusi daerah* disebabkan oleh :
  - Retribusi Pelayanan Kesehatan , diakibatkan karena menurunnya wajib retribusi/ masyarakat yang dilayani pemeriksaan kesehatan karena adanya perbaikan derajat kesehatan masyarakat.

- Retribusi Pasar diakibatkan karena terdapatnya perbaikan/rehabilitasi beberapa pasar dalam wilayah Kab. Bone
- Retribusi terminal diakibatkan menurunnya kendaraan angkutan kota yang masuk ke terminal type C
- Retribusi pemakaian kekayaan daerah diakibatkan karena terdapatnya beberapa rumah dinas yang kosong/dalam kondisi rusak sehingga tidak dapat difungsikan.

Rincian Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kab. Bone Tahun 2018 yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone sebagaimana terlampir pada *Lampiran IV*.

**b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2018 Dengan Tahun Sebelumnya**

**Tabel 3.6**  
**Perkembangan Capaian Indikator Kinerja .**

No	Indikator Kinerja	Capaian		
		2016	2017	2018
1	Persentase Realisasi PAD terhadap pencapaian Target	101,59	104,98	107,42
2	Persentase Kenaikan PAD	12,69	55,69	11,69
3	Persentase Capaian Pajak Daerah	105,83	120,94	123,14
4	Persentase Capaian Retribusi Daerah	79,18	100,97	87,52

Penjelasan lebih rinci tentang pencapaian indikator kinerja dapat di lihat pada *point d ( analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan. )*

**c. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan Target Jangka Menengah(RENSTRA) Tahun 2013-2018**

**Tabel 3.7**  
**Capaian Kinerja Tahun 2018 terhadap Target Akhir**  
**Renstra 2013-2018**

No.	Indikator Kinerja	Target Akhir	Realisasi Hingga 2018	Capaian Kinerja
1	Persentase Realisasi PAD terhadap pencapaian Target	100	107,41	107,41
2	Persentase Kenaikan PAD	50	149,49	298,98
3	Persentase Capaian Pajak Daerah	100	123,14	123,06
4	Persentase Capaian Retribusi Daerah	100	87,52	87,52

Penjelasan lebih rinci tentang Capaian Kinerja Tahun 2018 dengan Target Renstra dapat di lihat pada *point d ( analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan. )*

**d. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan.**

Pada tabel 3.6 di atas yang menjelaskan tentang Perbandingan Realisasi Antara Realisasi Kinerja Tahun 2018 Dengan Tahun Sebelumnya yang dapat dilihat dari 4 indikator terdapat 2 indikator yang menunjukkan peningkatan realisasi dari tahun sebelumnya, 1 indikator yaitu persentase capaian Retribusi Daerah dari tabel di atas dapat dilihat adanya penurunan dari tahun sebelumnya, penurunan tersebut diakibatkan karena adanya penurunan realisasi penerimaan retribusi daerah pada Tahun 2018 sebesar Rp. 2.803.700.293,- atau 87,52% disebabkan karena tidak tercapainya target penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pasar , Retribusi Terminal dan Retribusi pemakaian kekayaan daerah akan tetapi jika dilihat



dari realisasi tahun 2017 sebesar Rp. 12.795.043.203,- dan realisasi Tahun 2018 sebesar Rp. 19.652.213.419,- terdapat peningkatan sebesar Rp. 6.857.170.216,- atau 53,59 % dan terdapat 1 indikator yang menunjukkan penurunan realisasi dari tahun sebelumnya yaitu Persentase Kenaikan PAD hal ini disebabkan karena Penerimaan PAD Tahun 2018 tercapai sebesar Rp. 214.246.216.580,41 (data sebelum audit BPK) terdapat penurunan sebesar Rp. 66.231.882.904,59 atau (23,61) % dari Realisasi Penerimaan PAD Tahun 2017 yang dicapai sebesar Rp. 280.478.099.485.

Penurunan Realisasi Penerimaan ini disebabkan terdapat peningkatan dan penurunan penerimaan dari 4 jenis Penerimaan PAD yaitu dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Terdapat peningkatan Penerimaan Pajak Daerah sebesar 14,63 % yaitu dari Rp. 44.726.076.045 pada Tahun 2017 menjadi Rp. 51.236.484.457 pada Tahun 2018 khususnya Penerimaan Pajak Hotel dan BPHTB.
  2. Terdapat peningkatan Penerimaan Retribusi Daerah sebesar 54, 32 % yaitu pada Tahun 2017 Realisasi Rp. 12.734.571.559 Menjadi Rp. 19.652.213.419 pada Tahun 2018 khususnya peningkatan penerimaan dari Retribusi Pelayanan Kesehatan.
  3. Hasil Pengelola Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan terdapat peningkatan penerimaan sebesar Rp. 327.971.735 atau 4,87 % dari penerimaan bagian laba atas penyertaan modal pada Bank SulSelBar.
  4. Lain-lain PAD yang Sah terdapat penurunan sebesar Rp. 79.988.092.865 atau 36,98 % dari semula pada Tahun 2017 dicapai sebesar Rp. 216.289.485.975 menjadi Rp.136.301.581.064,41 pada Tahun 2018, Hal ini disebabkan Karena adanya pengalihan penempatan Dana Bos yang semula pada Tahun 2017 ditempatkan pada penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah, pada Tahun 2018 beralih penempatan ke penerimaan Lain-lain Pendapatan Yang sah berdasarkan Permendagri No. 33 tahun 2017 tentang pedoman Penyusunan APBD Tahun 2018.
- Penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja indikator Persentase capaian pajak daerah yaitu :



- Usaha peningkatan cakupan Obyek Pajak melalui Pendataan dan Verifikasi data Obyek/ Subyek ;
  - Mengintensifkan pengawasan pemungutan ;
  - Peningkatan kepatuhan Wajib Pajak melalui penyuluhan-penyuluhan ;
  - Pertumbuhan Pendapatan Riil perkapita yang mendorong kemampuan masyarakat membayar Pajak.
- Penyebab keberhasilan peningkatan kinerja indikator Persentase capaian retribusi daerah yaitu :
- Peningkatan fasilitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, sehingga mendorong Wajib Retribusi patuh memenuhi kewajibannya ;
  - Peningkatan pengawasan pelaksanaan pemungutan ;
  - Pemberian Penyuluhan-Penyuluhan .

Secara berkesinambungan Pemerintah melakukan perbaikan sarana prasarana penghasil retribusi seperti pasar –pasar tradisional. Secara keseluruhan, jumlah pasar yang telah diperbaiki sejak tahun 2014 s/d Tahun 2018 mencapai angka 53 (lima puluh Tiga ) pasar sebagaimana tabel data rehabilitasi dan pembangunan Pasar di bawah ini :

**Tabel 3.7.1**

***Data Rehabilitasi dan pembangunan Pasar Kecamatan***

No.	Nama Pasar	Kecamatan	Tahun				
			2014	2015	2016	2017	2018
1.	Pasar Balange	Salomekko	√				
2.	Pasar Inpres Pompanua	Ajangale	√				
3.	Pasar Inp.Lamurukung	Tellu Siattinge	√				
4.	Pasar Panyula	T.R. Timur	√			√	
5.	Pasar Kading	Barebbo	√	√	√		√
6.	Pasar Inp.Pattiro Mampu	Dua Boccoe	√				

7.	Pasar Inp. Lalebata	Lamuru	√	√		√	√
8.	Pasar Bajoe	T.R. Timur	√				√
9.	Pasar Tobenteng	Amali	√			√	
10.	Pasar TujuE	Tellu Limpoe	√				
11.	Rehab.Kantor Pengelola Pasar		√				
12.	Pasar Taretta	Amali		√			
13.	Pasar USA	Palakka		√			
14.	Pasar Mattirowalie	Tellu Siattinge		√			
15.	Pasar Tinco	Libureng		√			
16.	Pasar Kadai	Mare		√			√
17.	Pasar Lippujangge	Bengo		√		√	
18.	Pasar Laccibunge	Libureng		√		√	
19.	Pasar Balle	Kahu		√			
20.	Pasar Tanete	Cina		√	√		
21.	Pasar Mallari	Awangpone		√			
22.	Pasar Parippung	Barebbo		√			√
23.	Pasar Apala	Barebbo			√		
24.	Pasar Kuliner	T.R. Barat			√		
25.	Pasar Congko	Barebbo			√		
26.	Pasar Palakka	T.R. Barat			√	√	
27.	Pasar Bajoe	T.R. Timur			√		
28.	Pasar Pasaka	Kahu			√		
29.	Pasar Pattiro	Sibulue			√	√	
30.	Pasar Kaccope	Kajuara			√		
31.	Pasar Inp. Tana Batu	Libureng			√		
32.	Pasar Mutiara	Lamuru			√		
33.	Pasar Bulu-Bulu	Awangpone			√		
34.	Pasar Lattobang	Patimpeng			√		
35.	Pasar Bakke	Barebbo				√	
36.	Pasar Arasoe	Cina				√	

37.	Pasar Buarenge	Sibulue				√	
38.	Pasar Nusa	Kahu				√	
39.	Pasar Benteng	Sibulue				√	
40.	Pasar Tokaseng	Tellu siattinge				√	
41.	Pasar Pallime	Cenrana				√	
42.	Pasar Parangeng	Cenrana				√	
43.	Pasar Bulummpare	Lapri					√
44.	Pasar Timurung	Ajangale					√
45.	Pasar Maradda	Kahu					√
46.	Pasar Bengo	Bengo					√
47.	Pasar Tappale	Libureng					√
48.	Pasar Lonrong	Ponre					√
49.	Pasar Sailong	Dua Boccoe					√
50.	Pasar Ujung	Dua Boccoe					√
51.	Pasar Waetuo	T.R. Timur					√
52.	Pasar Uloe	Dua Boccoe					√
53.	Pasar Panyili	Dua Boccoe					√
<b>REALISASI ANGGARAN</b>			831.471.000	903.558.000	957.571.000	992.060.000	897.150.000

Pada tabel 3.7 di atas yang menjelaskan tentang Perbandingan Realisasi Antara Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan Target Jangka Menengah (RENSTRA) Tahun 2013-2018 yang dapat dilihat dari 4 indikator terdapat 3 indikator yang menunjukkan peningkatan realisasi capaian kinerja Tahun 2018 terhadap target renstra dan 1 indikator yang menunjukkan adanya penurunan realisasi capaian kinerja Tahun 2018 terhadap target renstra 2013-2018 yaitu *persentase capaian Retribusi Daerah* dari tabel di atas dapat dilihat adanya penurunan realisasi capaian kinerja Tahun 2018 terhadap target renstra penurunan tersebut diakibatkan karena adanya penurunan realisasi penerimaan retribusi daerah pada tahun 2018 dan persentase kenaikan PAD pada akhir Renstra 2013-2018 menunjukkan peningkatan sebesar Rp. 128.371.613.852,- atau 298,98 % dari nilai realisasi PAD Tahun 2013 ( sebagaimana terlampir pada lampiran II )

e. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

*Tabel 3.8*  
*Efisiensi Penggunaan Sumber Daya I*

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Rata-Rata Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran	Efisiensi (5-6)
1	2	3	4	5	6
1	Persentase Realisasi PAD terhadap pencapaian Target	107,41	108,74	99,62	9,12
2	Persentase Kenaikan PAD	116,9			
3	Persentase Capaian Pajak Daerah	123,14			
4	Persentase Capaian Retribusi Daerah	87,52			

Capaian kinerja sasaran ini adalah 108,74 % yang jika disandingkan dengan persentase realisasi keuangan yaitu 99,62 %, maka efisiensi penggunaan sumber daya untuk pencapaian target kinerja sasaran ini adalah 9,12 %

f. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Pelaksanaan kegiatan strategis yang menunjang Pencapaian Kinerja Bapenda Kab. Bone terdiri dari 3 (Tiga ) Program dan 15 ( Lima Belas ) kegiatan pokok. Adapun alokasi anggaran untuk mendukung program dan kegiatan ini adalah sebesar Rp. 5.673.842.000,- realisasi sebesar Rp. 5.652.277.408,-Atau 99,62 %. Penjelasan analisis capaian kinerja untuk sasaran strategis sebagai berikut :

**1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4,479,726,000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 4,459,577,608 atau 99,55 % dan realisasi fisik sebesar 100,00%, program ini didukung dengan kegiatan :**

1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber – sumber Pendapatan Daerah, dengan capaian terealisasinya target penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.

199,472,831,779,- yang dapat dicapai sebesar Rp.214,280,897,388.95 atau 107,42 % dari penerimaan 10 jenis pajak daerah, 20 jenis retribusi daerah, 2 jenis penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan 11 jenis penerimaan lain – lain PAD yang sah.

2. Optimalisasi Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan dengan terciptanya administrasi pengelolaan PBB dengan target jumlah masyarakat yang terlayani dalam pengajuan permohonan pemecahan, penggabungan, pengurangan, data baru, balik nama, pembetulan dan pembatalan. Adapun berkas yang masuk selama Tahun 2018 sebanyak 1,311 berkas perubahan.
3. Optimalisasi Penagihan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah lainnya dengan capaian terealisasinya target Penerimaan Pajak Daerah sebesar Rp. 41,636,794,167,- yang dapat dicapai sebesar Rp. 51,271,353,220,- atau 123,14 % dan Retribusi Daerah dengan target Rp. 22,455,566,712,- dan terealisasi Rp. 19,652,213,419 atau 87,52 %
4. Pemutakhiran Data Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan, dengan capaian terlaksananya pemutakhiran Data PBB-P2 untuk meningkatkan keakuratan Data PBB-P2 pada data SISMIOP yang dapat memberikan kontribusi yang positif dalam peningkatan penerimaan PAD di sector Pajak PBB-P2 dimana Target Pajak Daerah Tahun 2018 Rp. 15,727,789,000,- dengan realisasi Rp. 17,178,532,694,- atau sebesar 109,22%  
Adapun Wilayah pemutakhiran data PBB-P2 Tahun 2018 sbb :

Kecamatan/Desa	Sebelum SISMIOP	Setelah SISMIOP	Jumlah Peningkatan
<b>Libureng</b>			
Desa Ponre-Ponre	1.736 OP	2.971 OP	1,235 OP
<b>Amali</b>			
Kelurahan Mampotu	741 OP	1.498 OP	757 OP
Desa Taccipong	686 OP	1.418 OP	732 OP
<b>Total</b>			<b>2,724 OP</b>

Untuk Kegiatan Updating Peta dilaksanakan di Kelurahan Ta' Kelurahan Pappolo dan Kelurahan Walanae .

5. Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan capaian terlaksananya pendataan wajib pajak. Jumlah Obyek Pajak yang telah didata pada Tahun 2018 Pajak Reklame 330 Objek Pajak, Pajak Hiburan 8 Objek Pajak, Pajak Sarang Burung Walet 39 Objek Pajak, Pajak Hotel 39 Objek Pajak, Pajak Restoran 605 Objek Pajak dan Retribusi Sewa Rumah daerah Sebesat 56 Objek Pajak.
6. Penerbitan dan Distribusi Dokumen Ketetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan capaian proses pelaksanaan Penerbitan Ketetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berjalan optimal sehingga memberikan kemudahan dalam melakukan penagihan. Pelaksanaan Validasi dilaksanakan secara akurat untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan jumlah surat ketetapan yang ditetapkan Pajak Reklame 330 Objek Pajak, Pajak Hiburan 8 Objek Pajak, Pajak Sarang Burung Walet 39 Objek Pajak, Pajak Hotel 39 Objek Pajak, Pajak Restoran 605 Objek Pajak dan Retribusi Sewa Rumah daerah Sebesat 56 Objek Pajak menerbitkan Surat Ketetapan kurang bayar bagi data BPHTB yang dianggap tidak sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada di lapangan. data BPHTB yang telah diverifikasi pada Tahun 2018 sebanyak 1,631 Objek Pajak
7. Operasional Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan dengan capaian terealisasinya pajak bumi dan bangunan sebesar Rp. 17,178,532,694,- dari target Rp. 15,727,789,000,- Dengan capaian penyediaan biaya jasa administrasi pemungutan bagi Kolektor, Kepala Desa dan Camat selaku pelaksana Penagihan Pajak Bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Terdapat 604.000 lembar SPPT PBB yang akan ditagih kepada wajib pajak.
8. Peningkatan Pengelolaan Administrasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan capaian semakin efektifnya pengelolaan administrasi penerimaan PBB-P2.

9. Penatausahaan Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya dengan capaian semakin efisiennya Penatausahaan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah.
  10. Penyusunan Laporan Pendapatan Daerah dan Pengelolaan Benda Berharga dengan capaian semakin efektifnya Pelaporan Pendapatan Daerah dan Pengelolaan Benda Berharga yang akurat dan tepat waktu.
  11. Kegiatan Penyusunan Perencanaan Penerimaan PAD dan Pendapatan Daerah Lainnya terangkum dalam Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan pagu dana sebesar Rp. 22.462.000,- dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan, terealisasi sebesar Rp. 21.047.750,- terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 1.414.250,- dengan demikian realisasi keuangan sebesar 93,70 % dan Realisasi Fisik/kegiatan sebesar 100%. Dengan melakukan pengelolaan data tentang penerimaan pendapatan daerah, potensi penerimaan dan tersusunnya data penerimaan PAD untuk perubahan APBD dan APBD Pokok Tahun berikutnya
  12. Penerbitan dan Distribusi Dokumen Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan capaian data yang terdapat pada aplikasi SISMIOP akurat. Pencetakan SPPT, STTS dan DHKP dilaksanakan dengan optimal , jumlah SPPT diterbitkan sebanyak 604.000 Lembar dan proses pendistribusian meliputi 44 kelurahan dan 328 Desa
- 2. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri, dengan alokasi anggaran Rp. 1,073,941,000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 1,072,667,300 atau 99,88 % dan realisasi fisik sebesar 100 %. Program ini didukung kegiatan :**
1. Pengembangan pasar dan distribusi barang / produk, dengan capaian terlaksananya rehabilitasi 16 Pasar yaitu
    - Pasar Timurung Kec. Ajangale
    - Pasar Waetuwo Kec. Tanete Riattang Timur
    - Pasar Parippung Kec. Barebbo
    - Pasar Uloe Kec. Dua Boccoe



- Pasar Panyili Kec. Dua Boccoe
- Pasar sailong Kec. Dua Boccoe
- Pasar Ujung Kec. Dua Boccoe
- Pasar Bulumpare Kec. Lappariaja
- Pasar Bajoe Kec. Tanete Riattang Timur
- Pasar Lonrong Kec. Ponre
- Pasar Kading Kec. Barebbo
- Pasar Bengo Kec. Bengo
- Pasar Tappale Kec. Libureng
- Pasar Kadaai Kec. Mare
- Pasar Maradda Kec. Kahu
- Pasar Lalebata Kec. Lamuru

2. Penataan Tempat Berusaha Bagi Pedagang dengan capaian terlaksananya penataan 11 (sebelas) pasar yaitu :

- Pasar Tanete Kel. Tanete Harapan Kec. Cina
- Pasar Congko Desa Congko Kec. Barebbo
- Pasar Lippujange Desa Samaenre kec. Bengo
- Pasar Apala Kel. Apala Kec. Barebbo
- Pasar Balle Kel. Palattae Kec. Kahu
- Pasar Kadaai Kel. Padaelo Kec. Mare
- Pasar Pompanua Kel. Pompanua Kec. Ajangale
- Pasar Cenrana Desa Cenrana Kec. Cenrana
- Pasar Koppe Desa Liliriawang Kec. Bengo
- Pasar Pammusureng Kec. Bontocani
- Pasar Tujue Desa Gayaa Baru Kec. Tellu Limpoe

3. **Program Penataan Peraturan Perundang – undangan, dengan alokasi anggaran Rp.120,175,000 realisasi keuangan sebesar Rp. 120,032,500,00 atau 99,88 % dan realisasi fisik sebesar 100%. Program ini didukung kegiatan :**

1. Sosialisasi Kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan capaian adalah sebagai berikut :



a. Sosialisasi Kepada bendahara pengeluaran

Sosialisasi kepada para kolektor pasar dan Bendahara Pengeluaran yang telah dilaksanakan pada 8 februari 2018, di Hotel Helios yang diikuti 125 orang peserta yang berasal dari Organisasi perangkat daerah dan bendahara pengeleuran kecamatan

Materi yang diberikan kepada peserta berupa penjelasan tentang pengelolaan dan pemungutan retribusi pasar agar kolektor berupaya bekerja dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku menerapkan penataan administrasi ssesuai yang dianjurkan dalam kegiatan ini

b. Sosialisasi melalui media massa/media cetak

Dilaksanakan dengan memasang iklan himbauan pembayaran pajak dan retribusi pada Koran/media cetak

c. Sosialisasi Kepada masyarakat dan para pejabat ditingkat kecamatan dan desa/kelurahan

Sosialisasi kepada masyarakat dilakukan melalui pertemuan langsung kepada masyarakat baik di rumah maupun tempat usaha. Melalui pemasangan informasi pencapaian Penerimaan PAD dan Pengelolaan Pajak dan Retribusi. Sosialisasi juga dilaksnakan dengan menyebarkan leaflet Pajak Daerah serta memberikan pemahaman kepada pejabat/aparat di 24 Kecamatan dan 7 Desa.

Rincian Program Strategi untuk pencapaian kinerja sasaran ini sebagaimana terlampir pada *Lampiran V*

**g. Permasalahan dan Alternatif Solusi**

Walaupun capaian pada sasaran ini sudah optimal namun masih tetap ada permasalahan di lapangan antara lain alokasi Dana APBD terbatas sehingga Pemeliharaan Pasar hanya sebatas Rehabilitasi yang sifatnya mendesak. Oleh karena itu perlu didukung dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat.

### 3.2 REALISASI ANGGARAN

#### 1. Realisasi Penerimaan

##### 1. Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kab. Bone :

- Pendapatan Asli Daerah	Rp. 214.280.897.388,95	(107,42%)
- Dana Perimbangan	Rp.1.548.309.677.324,00	( 98,71%)
- Lain-lain Pendapatan yang sah	Rp. 489.593.326.930,00	( 97,51%)

**Jumlah** **Rp. 2.252.183.901.642,95 ( 99,21%)**

##### 2. Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kab. Bone :

- Pajak Daerah	Rp. 51.271.353.220,00	(123,14%)
- Retribusi Daerah	Rp. 19.652.213.419,00	(87,52 %)
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Rp. 7.055.937.640,00	(99,49 %)
- Lain-Lain PAD yang sah	Rp. 136.301.393.109,95	(106,25%)

**Jumlah** **Rp. 214.280.897.388,95 (107,42%)**

##### 3. Realisasi Penerimaan PAD Khusus yang Dikelola Bapenda Kab. Bone :

- Pajak Hotel	Rp. 634.041.902,00	(138,53%)
- Pajak Restoran	Rp. 3.300.434.654,00	(229,35%)
- Pajak Hiburan	Rp. 196.421.080,00	(108,52%)
- Pajak Reklame	Rp. 764.216.925,00	(183,57%)
- Pajak Penerangan Jalan	Rp. 21.500.315.479,00	(113,50%)
- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Rp. 400.424.196,00	(100,11%)
- Pajak Air Tanah	Rp. 104.198.980,00	(197,96%)
- Pajak Sarang Burung Walet	Rp. 22.300.000,00	(223,00%)
- Pajak Bumi dan Bangunan	Rp. 17.178.532.694,00	(109,22%)

Perdesaan dan Perkotaan

- Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan	Rp.	7.170.467.310,00	(178,81%)
- Retribusi Pasar	Rp.	2.159.107.000,00	( 89,34%)
- Ret.Pasar Grosir/Pertokoan	Rp.	79.776.000,00	(170,99%)
- Ret.Pemakaian Kekayaan Daerah	Rp.	317.200.000,00	( 87,84%)
- Ret.Tempat Khusus Parkir	Rp.	20.300.000,00	(135,33%)
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>53.847.736.220</b>	<b>(130,59 %)</b>

## 2. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran APBD yang dikelola Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. **Rp. 14.579.257.683,-** ( 92,73 %) dari total pagu anggaran, yang rinciannya tersaji pada tabel berikut ini :

*TABEL 3.11*

*Realisasi Keuangan Bapenda Kab. Bone Tahun 2018*

NO	JENIS BELANJA	ANGGARAN	REALISASI	%
1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>Rp. 7.972.158.077,-</b>	<b>Rp. 6.896.964.459,-</b>	<b>86,51</b>
2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>Rp. 7.750.000.000,-</b>	<b>Rp. 7.682.293.224,-</b>	<b>99,13</b>
	- Belanja Pegawai	Rp. 225.594.000,-	Rp. 221.650.000,-	98,25
	- Belanja Barang dan Jasa	Rp. 6.945.456.000,-	Rp. 6.895.397.049,-	99,27
	- Belanja Modal	Rp. 578.950.000,-	Rp. 565.246.175,-	97,63
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 15.722.158.077,-</b>	<b>Rp. 14.579.257.683,-</b>	<b>92,73</b>

Rincian Realisasi Anggaran Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone Tahun 2018 sebagaimana terlampir pada *Lampiran VI*.

### 3. Pemanfaatan Anggaran

- a. Pemanfaatan anggaran yang bersumber dari anggaran kinerja Badan Pendapatan Daerah terdiri dari :

1) Belanja Tidak Langsung

Realisasi anggaran belanja tidak langsung Badan Pendapatan Daerah dalam Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 6.896.964.459,- ( 86,51 %) yang diarahkan untuk :

Gaji dan Tunjangan	Rp. 3.715.341.413,-
Biaya Pemungutan Pajak Daerah	Rp. 245.563.670,-
Tambahan Penghasilan PNS	Rp. 187.800.000,-
Insentif Pemungutan Pajak Daerah	Rp. 2.010.025.168,-
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	Rp. 738.234.208,-

2) Belanja Langsung

Realisasi anggaran belanja langsung Badan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 7.682.293.224,- ( 99,13 %) dengan jumlah 8 program dan 31 kegiatan.

### 3.3 HAL-HAL LAIN YANG PERLU DILAPORKAN

➤ **Penghargaan yang telah diterima**

Dalam periode 2013-2018, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone telah meraih penghargaan dibidang pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yaitu sertifikat internasional dari PT. Mutuagung Lestari atas Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2015 sejak Tahun 2015.

➤ **Capaian Kinerja Strategis Lainnya**

Terkait dengan perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Bone berdasarkan Perbup No. 87 Tahun 2018, tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bone tanggal 13 November 2018 (Berita daerah nomor 87), di dalamnya terdapat perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bapenda Kab. Bone.

Realisasi Capaian Kinerja Utama (IKU) tersebut, hingga Tahun 2018 digambarkan pada tabel berikut ini :

**TABEL 3.12**  
**CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**BAPENDA KAB. BONE**

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KINERJA AWAL ( 2013)	KINERJA AKHIR (2018)
1.	Persentase Rata-Rata Kenaikan PAD	65,67	11,69
2.	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	6,17	9,54

Berdasarkan tabel 3.3.1 di atas dapat dilihat pada indikator persentase rata-rata kenaikan Pendapatan Asli Daerah pada kinerja awal Tahun 2013 dengan realisasi sebesar Rp. 85.874.602.728,88 Dibanding Tahun 2012 sebesar Rp. 51.835.868.414,42 Atau 65,67 %, sedangkan realisasi Penerimaan PAD Tahun 2018 tercapai sebesar Rp. 214.246.216.580,41 atau 11,69 % (data sebelum audit BPK). Kenaikan PAD sangat tinggi pada Kinerja Awal (2013) disebabkan karena :

- Adanya Kebijakan pengalihan beberapa jenis Pajak Negara menjadi Pajak Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( penyerahan PBB-P2 dan BPHTB menjadi kewenangan daerah )
- Penempatan penerimaan Jasa layanan kesehatan di RSUD berstatus BLUD sebagai penerimaan Lain-Lain PAD yang sah

➤ **Permasalahan dan Solusi**

Beberapa hal yang berpengaruh sehingga pencapaian kinerja sasaran Badan Pendapatan Daerah tahun 2018 belum tercapai secara optimal disebabkan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Rasio Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bone dari sector pajak daerah masih rendah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) karena pembentukan PDRB Kabupaten Bone masih didominasi dari sektor pertanian dimana sektor ini bukan merupakan objek Pajak Daerah
- 2) Mekanisme pengelolaan Pajak Daerah pada tingkatan objek/wajib pajak masih dikelola secara manual sehingga peluang untuk menghindari pembayaran Pajak oleh wajib pajak masih tinggi
- 3) Instrumen Perpajakan yang digunakan dalam penindakan pelanggaran ketentuan perpajakan belum memadai/tersedia seperti Pemeriksa Pajak, Juru Sita Pajak, dan Penyidik Perpajakan.
- 4) Kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan perpajakan belum memadai.

Oleh karena itu untuk tahun yang akan datang diupayakan langkah-langkah antisipatif sebagai berikut :

- 1) Perlu mencari alternatif lain yang dapat mendukung peningkatan Pendapatan Daerah diluar Pajak Daerah seperti Pemberdayaan Aset Daerah dan melalui penyertaan modal Daerah pada lembaga keuangan yang sehat yang dapat meningkatkan penerimaan dari sektor deviden
- 2) Perlunya didorong objek/wajib pajak untuk memanfaatkan teknologi berbasis IT utamanya objek pajak yang berasal dari sector pelayanan jasa, untuk memperkecil tingkat kebocoran pajak daerah
- 3) Perlu segera pengadaan SDM yang nantinya akan melaksanakan fungsi pemeriksa pajak, juru sita pajak dan penyidik pajak melalui perekrutan dan pelatihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- 4) Perlu diadakan sosialisasi dengan cara penyuluhan secara berkesinambungan terkait ketentuan/norma hukum perpajakan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Dalam manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah, LKj menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LKj akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

LKj bagi Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone juga menjadi punya makna strategis, sebagai bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone. Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan 2018, namun juga melihat tren pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir RENSTRA. Secara umum, nampak bahwa kinerja Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone pada tahun 2018 adalah sangat baik, karena terdapat 3 indikator memenuhi kriteria sangat tinggi. Terhadap Indikator yang capaiannya sudah mencapai target dan bahkan melampaui target diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan acuan untuk mempertahankan dan meningkatkan proses perencanaan, pelaksanaan sehingga memberikan nilai yang lebih baik pada Tahun berikutnya.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam RENSTRA dan RENCANA KERJA (RENJA) 2018, yang mencakup juga penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Juga mencakup bukan hanya sekedar pelaksanaan program/kegiatan yang rutin dilakukan, namun juga pengembangan inovasi dalam berbagai bentuk.



Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone ke depan yaitu Perlu mencari alternatif lain yang dapat mendukung peningkatan Pendapatan Daerah diluar Pajak Daerah seperti Pemberdayaan Aset Daerah dan melalui penyertaan modal Daerah pada lembaga keuangan yang sehat yang dapat meningkatkan penerimaan dari sektor deviden dan Perlu segera pengadaan SDM yang nantinya akan melaksanakan fungsi pemeriksa pajak, juru sita pajak dan penyidik pajak melalui perekrutan dan pelatihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Bagi instansi di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone sendiri, ini bisa berarti perlunya peningkatan efektivitas dan pencapaian kinerja sehingga beberapa tantangan ini bisa dijawab.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan LKj, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaannya. Hal ini akan menjadikan LKj benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik.



**CASCADING BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. BONE**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	1. Persentase Realisasi PAD terhadap pencapaian target	1. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	- Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah Daerah	- SEKRETARIAT	
				- Optimalisasi Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	- BIDANG P20	
				- Optimalisasi Penagihan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Lainnya	- BIDANG PENAGIHAN	
				- Pemutakhiran Data Objek Pajak dan Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	- BIDANG PENDAFTARAN, PENDATAAN DAN PENETAPAN	
		- Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah				
		- Penerbitan dan Distribusi Dokumen Ketetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah				
		- Operasional Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan				
		- Peningkatan Pengelolaan Administrasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan				
		- Penatausahaan Penerimaan Pajak Daerah Retribusi Daerah, Pajak Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya		- BIDANG PEMBUKUAN & PELAPORAN		
		- Penyusunan Laporan Pendapatan Daerah dan Pengelolaan Benda Berharga				
		- Penyusunan Perencanaan Penerimaan PAD dan Pendapatan Daerah Lainnya				
		- Penerbitan dan Distribusi Dokumen Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan &Perkotaan				
		2. Persentase Kenaikan PAD	- Sosialisasi Kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	BIDANG P20		
			3. Persentase Capaian Pajak Daerah	2. Penataan Peraturan Perundang-Undangan	3. Peningkatan efisiensi perdagangan Dalam negeri	- Pengembangan pasar dan distribusi barang / Produk
		- Penataan tempat berusaha bagi pedagang				
4. Persentase Capaian Retribusi Daerah						

**REALISASI ANGGARAN  
BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. BONE  
TAHUN 2018**

NO	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50.000.000	49.391.245	98,78
		- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	473.616.000	464.800.760	98,14
		- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.895.000	8.890.000	99,94
		- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	35.000.000	34.995.000	99,99
		- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah	150.000.000	149.672.832	99,78
		- Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	237.676.000	236.553.399	99,53
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran	- Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	361.250.000	360.996.175	99,93
		- Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	103.300.000	101.850.000	98,60
		- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	99.400.000	91.000.000	91,55
		- Pengadaan mebeleur	15.000.000	11.400.000	76,00
		- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	122.880.000	122.130.000	99,39
		- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	124.665.000	122.938.273	98,61
		- Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	20.000.000	19.985.000	99,93
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	43.500.000	42.900.000	98,62
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	- Pendidikan dan Pelatihan Formal	220.000.000	201.542.132	91,61
5	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	- Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah Daerah	682.838.000	680.523.141	99,66
		- Optimalisasi Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	459.044.000	454.657.793	99,04
		- Optimalisasi Penagihan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Lainnya	102.753.000	102.419.000	99,67

NO	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
		- Pemutakhiran Data Objek Pajak dan Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	550.089.000	549.801.500	99,95
		- Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	92.693.000	91.170.000	98,36
		- Penerbitan dan Distribusi Dokumen Ketetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	122.054.000	121.439.100	99,50
		- Operasional Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	1.614.834.000	1.614.782.950	100,00
		- Peningkatan Pengelolaan Administrasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	65.946.000	65.466.000	99,27
		- Penatausahaan Penerimaan Pajak Daerah Retribusi Daerah, Pajak Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya	41.653.000	41.523.000	99,69
		- Penyusunan Laporan Pendapatan Daerah dan Pengelolaan Benda Berharga	426.392.000	417.227.124	97,85
		- Penyusunan Perencanaan Penerimaan PAD dan Pendapatan Daerah Lainnya	32.670.000	32.588.000	99,75
		- Penerbitan dan Distribusi Dokumen Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan & Perkotaan	288.760.000	287.980.000	99,73
6	Peningkatan efisiensi perdagangan Dalam negeri	- Pengembangan pasar dan distribusi barang / Produk	972.700.000	971.800.000	99,91
		- Penataan tempat berusaha bagi pedagang	101.241.000	100.867.300	99,63
7	Penataan Peraturan Perundang-Undangan	- Sosialisasi Kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	120.175.000	120.032.500	99,88
8	Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.976.000	10.971.000	99,95
		<b>JUMLAH</b>	<b>7.750.000.000</b>	<b>7.682.293.224</b>	<b>99,13</b>

**TARGET DAN REKAPITULASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BONE**  
**KEADAAN S/D 31 Desember 2018**

KODE REKENING	U R A I A N	TARGET	REALISASI			SELISIH	%
			S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>2.270.156.586.646,00</b>	<b>2.195.323.555.889,11</b>	<b>56.274.003.690,30</b>	<b>2.251.597.559.579,41</b>	<b>(18.559.027.066,59)</b>	<b>99,18</b>
<b>4 1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>199.472.831.779,00</b>	<b>193.686.890.985,11</b>	<b>20.559.325.595,30</b>	<b>214.246.216.580,41</b>	<b>14.773.384.801,41</b>	<b>107,41</b>
<b>4 1 1</b>	<b>PAJAK DAERAH</b>	<b>41.636.794.167,00</b>	<b>47.080.131.337,02</b>	<b>4.156.353.119,98</b>	<b>51.236.484.457,00</b>	<b>9.599.690.290,00</b>	<b>123,06</b>
<b>4 1 1 01</b>	<b>Pajak Hotel</b>	<b>457.700.567,00</b>	<b>581.334.352,00</b>	<b>52.707.550,00</b>	<b>634.041.902,00</b>	<b>176.341.335,00</b>	<b>138,53</b>
4 1 1 01 05	Hotel Bintang Dua	301.760.567,00	477.370.321,00	40.022.050,00	517.392.371,00	215.631.804,00	1.149,76
4 1 1 01 06	Hotel Bintang Satu	45.000.000,00	31.061.031,00	375.000,00	31.436.031,00	(13.563.969,00)	95,87
4 1 1 01 07	Hotel Melati Tiga	32.790.000,00	15.548.000,00	2.695.000,00	18.243.000,00	(14.547.000,00)	55,64
4 1 1 01 08	Hotel Melati Dua	33.400.000,00	19.630.000,00	3.370.000,00	23.000.000,00	(10.400.000,00)	68,86
4 1 1 01 09	Hotel Melati Satu	44.750.000,00	37.725.000,00	6.245.500,00	43.970.500,00	(779.500,00)	98,26
<b>4 1 1 02</b>	<b>Pajak Restoran</b>	<b>1.439.030.000,00</b>	<b>2.717.821.685,00</b>	<b>547.744.206,00</b>	<b>3.265.565.891,00</b>	<b>1.826.535.891,00</b>	<b>226,93</b>
4 1 1 02 02	Rumah Makan	1.408.830.000,00	2.717.821.685,00	547.744.206,00	3.265.565.891,00	1.856.735.891,00	231,79
4 1 1 02 06	Rumah Makan Yang Tidak Memiliki NPWP	30.200.000,00	-	-	-	(30.200.000,00)	-
<b>4 1 1 03</b>	<b>Pajak Hiburan</b>	<b>181.000.000,00</b>	<b>178.097.430,00</b>	<b>18.323.650,00</b>	<b>196.421.080,00</b>	<b>15.421.080,00</b>	<b>108,52</b>
4 1 1 03 02	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	28.000.000,00	-	-	-	(28.000.000,00)	-
4 1 1 03 07	Karaoke	145.000.000,00	178.097.430,00	18.323.650,00	196.421.080,00	51.421.080,00	135,46
4 1 1 03 09	Sirkus/Akrobat/Sulap	5.000.000,00	-	-	-	(5.000.000,00)	-
4 1 1 03 19	Pertandingan Olahraga	3.000.000,00	-	-	-	(3.000.000,00)	-
<b>4 1 1 04</b>	<b>Pajak Reklame</b>	<b>416.300.000,00</b>	<b>757.070.675,00</b>	<b>7.146.250,00</b>	<b>764.216.925,00</b>	<b>347.916.925,00</b>	<b>183,57</b>
4 1 1 04 01	Reklame Papan/BillBoard/Videotron/Megatron	380.000.000,00	714.018.175,00	6.256.250,00	720.274.425,00	340.274.425,00	189,55
4 1 1 04 02	Reklame Kain	33.000.000,00	34.752.500,00	890.000,00	35.642.500,00	2.642.500,00	108,01
4 1 1 04 03	Reklame Melekat/Stiker	2.200.000,00	8.300.000,00	-	8.300.000,00	6.100.000,00	377,27
4 1 1 04 04	Reklame Selebaran	1.100.000,00	-	-	-	(1.100.000,00)	-
<b>4 1 1 05</b>	<b>Pajak Penerangan Jalan</b>	<b>18.942.337.000,00</b>	<b>19.588.746.332,00</b>	<b>1.911.569.147,00</b>	<b>21.500.315.479,00</b>	<b>2.557.978.479,00</b>	<b>113,50</b>
4 1 1 05 01	Pajak Penerangan Jalan PLN	18.942.337.000,00	19.588.746.332,00	1.911.569.147,00	21.500.315.479,00	2.557.978.479,00	113,50
<b>4 1 1 08</b>	<b>Pajak Air Tanah</b>	<b>52.637.600,00</b>	<b>94.680.980,00</b>	<b>9.518.000,00</b>	<b>104.198.980,00</b>	<b>51.561.380,00</b>	<b>197,96</b>
4 1 1 08 01	Pajak Air Tanah	52.637.600,00	94.680.980,00	9.518.000,00	104.198.980,00	51.561.380,00	197,96
<b>4 1 1 09</b>	<b>Pajak Sarang Burung Walet</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>15.900.000,00</b>	<b>6.600.000,00</b>	<b>22.500.000,00</b>	<b>12.500.000,00</b>	<b>225,00</b>
4 1 1 09 01	Pajak Sarang Burung Walet	10.000.000,00	15.900.000,00	6.600.000,00	22.500.000,00	12.500.000,00	225,00
<b>4 1 1 11</b>	<b>Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan</b>	<b>400.000.000,00</b>	<b>279.998.925,00</b>	<b>120.425.271,00</b>	<b>400.424.196,00</b>	<b>424.196,00</b>	<b>100,11</b>
4 1 1 11 06	Lain-lain Mineral bukan Logam dan Batuan	400.000.000,00	279.998.925,00	120.425.271,00	400.424.196,00	424.196,00	100,11
<b>4 1 1 12</b>	<b>Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan</b>	<b>15.727.789.000,00</b>	<b>16.137.244.240,02</b>	<b>1.041.288.453,98</b>	<b>17.178.532.694,00</b>	<b>1.450.743.694,00</b>	<b>109,22</b>
4 1 1 12 01	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	15.727.789.000,00	16.137.244.240,02	1.041.288.453,98	17.178.532.694,00	1.450.743.694,00	109,22
<b>4 1 1 13</b>	<b>Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan</b>	<b>4.010.000.000,00</b>	<b>6.729.236.718,00</b>	<b>441.030.592,00</b>	<b>7.170.267.310,00</b>	<b>3.160.267.310,00</b>	<b>178,81</b>
4 1 1 13 01	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	4.010.000.000,00	6.729.236.718,00	441.030.592,00	7.170.267.310,00	3.160.267.310,00	178,81
<b>4 1 2</b>	<b>RETRIBUSI DAERAH</b>	<b>22.455.566.712,00</b>	<b>17.248.349.802,00</b>	<b>2.403.863.617,00</b>	<b>19.652.213.419,00</b>	<b>(2.803.353.293,00)</b>	<b>87,52</b>
<b>4 1 2 01</b>	<b>RET. JASA UMUM</b>	<b>14.374.799.712,00</b>	<b>9.707.042.414,00</b>	<b>1.574.209.682,00</b>	<b>11.281.252.096,00</b>	<b>(3.093.547.616,00)</b>	<b>78,48</b>
4 1 2 01 01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	11.024.570.712,00	6.842.919.914,00	1.305.577.182,00	8.148.497.096,00	(2.876.073.616,00)	73,91
4 1 2 01 02	Ret. Pelayanan Persampahan/Kebersihan	225.000.000,00	206.650.000,00	23.350.000,00	230.000.000,00	5.000.000,00	102,22

KODE REKENING	U R A I A N	TARGET	REALISASI			SELISIH	%
			S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8
4 1 2 01 05	Ret. Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum	405.766.000,00	522.000.000,00	41.658.000,00	563.658.000,00	157.892.000,00	138,91
4 1 2 01 06	Ret. Pelayanan Pasar	2.416.818.000,00	1.980.362.500,00	178.744.500,00	2.159.107.000,00	(257.711.000,00)	89,34
	a. Ret. Pelayanan Pasar Sentral	510.844.000,00	345.267.500,00	31.710.500,00	376.978.000,00	(133.866.000,00)	73,80
	b. Ret. Pelayanan Pasar Inp. / Non Inp.	1.905.974.000,00	1.635.095.000,00	147.034.000,00	1.782.129.000,00	(123.845.000,00)	93,50
4 1 2 01 07	Ret. Pengujian Kendaraan Bermotor	164.520.000,00	149.300.000,00	15.780.000,00	165.080.000,00	560.000,00	100,34
4 1 2 01 08	Ret. Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	12.925.000,00	5.370.000,00	9.100.000,00	14.470.000,00	1.545.000,00	111,95
4 1 2 01 09	Ret. Penggantian Biaya Cetak Peta	200.000,00	440.000,00		440.000,00	240.000,00	220,00
4 1 2 01 13	Ret. Pengendalian Menara Telekomunikasi	125.000.000,00	-			(125.000.000,00)	
<b>4 1 2 02</b>	<b>RET. JASA USAHA</b>	<b>3.474.767.000,00</b>	<b>3.076.451.038,00</b>	<b>382.268.085,00</b>	<b>3.458.719.123,00</b>	<b>(16.047.877,00)</b>	<b>99,54</b>
4 1 2 02 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ( a + b + c)	361.113.000,00	268.700.000,00	48.500.000,00	317.200.000,00	(43.913.000,00)	87,84
	a. Dipenda - Sewa Rumah Daerah & BTC	171.113.000,00	97.300.000,00	10.500.000,00	107.800.000,00	(63.313.000,00)	63,00
	b. Dinas PU - Sewa Alat Berat	140.000.000,00	129.400.000,00	25.000.000,00	154.400.000,00	14.400.000,00	110,29
	c. Dinas Kelautan dan Perikanan ( Excavator )	50.000.000,00	42.000.000,00	13.000.000,00	55.000.000,00	5.000.000,00	110,00
4 1 2 01 02	Ret. Pasar Grosir / Pertokoan	46.656.000,00	70.944.000,00	8.832.000,00	79.776.000,00	33.120.000,00	170,99
4 1 2 02 03	Ret.Jasa Usaha Tempat Pelelangan ( a + b )	1.253.050.000,00	1.105.623.500,00	150.471.500,00	1.256.095.000,00	3.045.000,00	100,24
	a. Dinas Peternakan	1.100.000.000,00	977.558.500,00	125.431.500,00	1.102.990.000,00	2.990.000,00	100,27
	b. Dinas Perikanan	153.050.000,00	128.065.000,00	25.040.000,00	153.105.000,00	55.000,00	100,04
4 1 2 02 04	Ret.Jasa Usaha Terminal	200.000.000,00	127.335.000,00	5.845.000,00	133.180.000,00	(66.820.000,00)	66,59
4 1 2 02 05	Ret.Jasa Usaha Tempat Khusus Parkir ( a + b )	540.748.000,00	578.597.000,00	50.694.000,00	629.291.000,00	88.543.000,00	116,37
	a. Dinas Perhubungan	5.514.000,00	4.750.000,00	390.000,00	5.140.000,00	(374.000,00)	93,22
	b. Badan Pendapatan Daerah	15.000.000,00	18.572.000,00	1.728.000,00	20.300.000,00	5.300.000,00	135,33
	c. RSUD	520.234.000,00	555.275.000,00	48.576.000,00	603.851.000,00	83.617.000,00	116,07
4 1 2 02 08	Ret.Jasa Usaha Rumah Potong Hewan	150.000.000,00	104.510.000,00	11.255.000,00	115.765.000,00	(34.235.000,00)	77,18
4 1 2 02 09	Ret.Jasa Usaha Pelay. Kepelabuhanan	7.200.000,00	4.600.000,00	850.000,00	5.450.000,00	(1.750.000,00)	75,69
4 1 2 02 10	Ret.Jasa Usaha Tempat Rekreasi & OLGA ( a+b )	890.000.000,00	794.641.538,00	101.320.585,00	895.962.123,00	5.962.123,00	100,67
	a. Dinas Kebudayaan & Kepariwisata	800.000.000,00	679.651.000,00	84.700.000,00	764.351.000,00	(35.649.000,00)	95,54
	b. Kantor Pemuda dan Olahraga	90.000.000,00	114.990.538,00	16.620.585,00	131.611.123,00	41.611.123,00	146,23
4 1 2 02 13	Ret. Penjualan Produksi Usaha Daerah	26.000.000,00	21.500.000,00	4.500.000,00	26.000.000,00	-	100,00
<b>4 1 2 03</b>	<b>RET. PERIZINAN TERTENTU</b>	<b>4.606.000.000,00</b>	<b>4.464.856.350,00</b>	<b>447.385.850,00</b>	<b>4.912.242.200,00</b>	<b>305.895.200,00</b>	<b>106,65</b>
4 1 2 03 01	Ret. Izin Mendirikan Bangunan / I M B	4.600.000.000,00	4.456.819.350,00	447.145.850,00	4.903.965.200,00	303.965.200,00	106,61
4 1 2 03 04	Ret. Izin Trayek	6.000.000,00	7.690.000,00	240.000,00	7.930.000,00	1.930.000,00	132,17
4 1 2 03 05	Ret. Izin Usaha Perikanan		347.000,00		347.000,00	347.000,00	
<b>4 1 3</b>	<b>HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN</b>	<b>7.092.406.600,00</b>	<b>7.055.937.640,00</b>	<b>-</b>	<b>7.055.937.640,00</b>	<b>(36.468.960,00)</b>	<b>99,49</b>
<b>4 1 3 01</b>	<b>Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD</b>		-				
4 1 3 01 01	Bagian Laba Perusahaan Daerah	36.469.000,00	-			(36.469.000,00)	-
4 1 3 01 03	Bagian Laba Lembaga Keuangan Daerah	7.055.937.600,00	7.055.937.640,00		7.055.937.640,00	40,00	100,00

KODE REKENING	U R A I A N	TARGET	REALISASI			SELISIH	%
			S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>4 1 4</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH</b>	<b>128.288.064.300,00</b>	<b>122.302.472.206,09</b>	<b>13.999.108.858,32</b>	<b>136.301.581.064,41</b>	<b>-7.989.985.391,41</b>	<b>106,25</b>
<b>4 1 4 01</b>	<b>Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak dipisahkan</b>	<b>1.452.830.800,00</b>	<b>644.416.232,00</b>	<b>77.379.835,00</b>	<b>721.796.067,00</b>	<b>(731.034.733,00)</b>	49,68
4 1 4 01 05	Pejualan Kendaraan Dinas Roda Dua	-	-	-	-	-	-
4 1 4 01 06	Pejualan Kendaraan Dinas Roda Empat	262.830.800,00	-	-	-	(262.830.800,00)	-
4 1 4 01 19	Penjualan Lods Pasar Ruko ( Pasar Palakka)	1.190.000.000,00	632.416.232,00	77.379.835,00	709.796.067,00	(480.203.933,00)	59,65
	Pembayaran Ruko Pasar Lama Eks Pasar Sentral		12.000.000,00		12.000.000,00	12.000.000,00	
<b>4 1 4 02</b>	<b>Penerimaan Jasa Giro</b>	<b>6.000.000.000,00</b>	<b>6.449.962.426,46</b>	<b>718.091.568,42</b>	<b>7.168.053.994,88</b>	<b>7.168.053.994,88</b>	<b>119,47</b>
4 1 4 02 01	Penerimaan Jasa Giro Kas Daerah	6.000.000.000,00	6.449.962.426,46	718.091.568,42	7.168.053.994,88	7.168.053.994,88	119,47
	a. Jasa Giro Bank Sul-Sel	-	4.871.974.828,00	563.903.362,00	5.435.878.190,00	5.435.878.190,00	-
	b. Jasa Giro B S M	-	962.351,45	(30.000,00)	932.351,45	932.351,45	-
	c. Jasa Giro B R I	-	114.093.842,00	9.558.913,00	123.652.755,00	123.652.755,00	-
	d. Jasa Giro BNI BONE	-	808.083.505,00	74.457.957,00	882.541.462,00	882.541.462,00	-
	e. Jasa Giro BNI BTC	-	268.129.577,00	24.661.641,00	292.791.218,00	292.791.218,00	-
	f. Jasa Giro Bank Panin	-	64.027.884,86	6.879.451,56	70.907.336,42	70.907.336,42	-
	g. Jasa Giro Bank Mandiri		255.622.882,95	22.624.049,30	278.246.932,25	278.246.932,25	
	h. Jasa Giro Bank Muamalat		67.067.555,20	16.036.194,56	83.103.749,76	83.103.749,76	
<b>4 1 4 06</b>	<b>Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>208.933.661,00</b>	<b>-</b>	<b>208.933.661,00</b>	<b>108.933.661,00</b>	<b>208,93</b>
4 1 4 06 03	Bidang Pekerjaan Umum	100.000.000,00	208.933.661,00	-	208.933.661,00	108.933.661,00	208,93
	a. Dinas PU dan SDA		22.859.349,00		22.859.349,00	22.859.349,00	-
	b. Dinas Pendidikan		-		-	-	-
	c. RSUD Tenriawaru		12.054.018,00		12.054.018,00	12.054.018,00	-
	d. Dinas Kesehatan		9.632.014,00		9.632.014,00	9.632.014,00	-
	e. Dinas Pertanian Tanaman Pangan,Holtikultura & Perkebunan		-		-	-	-
	f. Dinas Kelautan & Perikanan		-		-	-	-
	g. Dinas Perindustrian		34.386.480,00		34.386.480,00	34.386.480,00	-
	h. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air		130.001.800,00	-	130.001.800,00	130.001.800,00	-
			-		-	-	-
<b>4 1 4 10</b>	<b>Pendapatan dari Pengembalian</b>	<b>600.000.000,00</b>	<b>724.738.319,33</b>	<b>28.771.200,50</b>	<b>753.509.519,83</b>	<b>153.509.519,83</b>	<b>125,58</b>
4 1 4 10 03	Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji & Tunj.	600.000.000,00	724.738.319,33	28.771.200,50	753.509.519,83	153.509.519,83	125,58
<b>4 1 4 15</b>	<b>Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah</b>	<b>120.135.233.500,00</b>	<b>114.274.421.567,30</b>	<b>13.174.866.254,40</b>	<b>127.449.287.821,70</b>	<b>7.314.054.321,70</b>	<b>106,09</b>
4 1 4 15 01	Lain-Lain Pendapatan BLUD	71.175.007.000,00	62.125.288.223,00	8.655.646.684,00	70.780.934.907,00	(394.072.093,00)	99,45
4 1 4 15 02	Partisipasi Pihak Ketiga	139.600.000,00	73.190.000,00	7.000.000,00	80.190.000,00	(59.410.000,00)	57,44
	a. Dinas Pertanian	99.800.000,00	32.000.000,00		32.000.000,00	(67.800.000,00)	32,06
	b. Dinas PU dan penataan ruang	15.000.000,00	20.210.000,00		20.210.000,00	5.210.000,00	134,73
	c. Dinas Perindustrian	24.800.000,00	20.980.000,00	7.000.000,00	27.980.000,00	3.180.000,00	186,53
4 1 4 15 04	Lain-Lain Pendapatan DPKAD	8.600.000.000,00	9.900.019.592,30	50.935.164,40	9.950.954.756,70	1.350.954.756,70	115,71
4 1 4 15 05	Dana Kapitasi JKN Pada Puskesmas	40.205.626.500,00	42.162.423.752,00	4.457.534.406,00	46.619.958.158,00	6.414.331.658,00	115,95
4 1 4 15 06	Lain-lain PAD ( Dinas PU & Penataan Ruang )	15.000.000,00	13.500.000,00	3.750.000,00	17.250.000,00	2.250.000,00	115,00
	a. Dinas PU & Penataan Ruang	15.000.000,00	13.500.000,00	3.750.000,00	17.250.000,00	2.250.000,00	
	b. Dinas Perhubungan		-		-	-	
	c. BAPENDA		-		-	-	

KODE REKENING	U R A I A N	TARGET	REALISASI			SELISIH	%
			S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8
4 2	DANA PERIMBANGAN	1.568.604.640.867,00	1.543.479.844.985,00	4.829.832.339,00	1.548.309.677.324,00	(20.294.963.543,00)	98,71
4 2 1	DANA BAGI HASIL PAJAK / BUKAN PAJAK	30.388.132.867,00	22.946.632.968,00	355.410.739,00	23.302.043.707,00	(7.086.089.160,00)	76,68
4 2 1 01	Bagi Hasil Pajak	23.957.422.000,00	17.511.213.514,00	71.949.098,00	17.583.162.612,00	(6.374.259.388,00)	73,39
4 2 1 01 01	Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB )	11.400.829.000,00	9.629.332.666,00	54.965.968,00	9.684.298.634,00	(1.716.530.366,00)	84,94
4 2 1 01 03	Bagi hasil dari PPh Ps1.25 & Ps1.29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri & PPh Ps1.21	12.556.593.000,00	7.881.880.848,00	16.983.130,00	7.898.863.978,00	(4.657.729.022,00)	62,91
4 2 1 02	Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam	6.430.710.867,00	5.435.419.454,00	283.461.641,00	5.718.881.095,00	(711.829.772,00)	88,93
4 2 1 02 01	Bagi Hasil Iuran Hak Pengusahaan Hutan	-	-	-	-	-	-
4 2 1 02 02	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan ( PSDH )	-	-	-	-	-	-
4 2 1 02 04	Bagi Hasil dari Iuran Tetap ( Land-Rent )	-	-	-	-	-	-
4 2 1 02 05	Bagi Hasil dari Iuran Eksploitasi ( Royalty )	-	-	-	-	-	-
4 2 1 02 06	Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan	-	418.326.491,00	-	418.326.491,00	418.326.491,00	-
4 2 1 02 08	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak dan Gas	1.232.656.000,00	862.866.100,00	51.650,00	862.917.750,00	(369.738.250,00)	70,00
4 2 1 02 09	Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam Perikanan	943.027.000,00	282.908.100,00	-	282.908.100,00	(660.118.900,00)	30,00
4 2 1 02 10	Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi	-	-	-	-	-	-
4 2 1 02 11	Bagi Hasil Cukai Tembakau	848.353.867,00	819.711.000,00	-	819.711.000,00	(28.642.867,00)	96,62
4 2 1 02 12	Bagi Hasil Mineral dan Batubara	3.384.029.000,00	3.028.962.763,00	258.936.783,00	3.287.899.546,00	(96.129.454,00)	97,16
4 2 1 02 13	Bagi Hasil SDA Kehutanan	22.645.000,00	22.645.000,00	24.473.208,00	47.118.208,00	24.473.208,00	208,07
4 2 2	DANA ALOKASI UMUM	1.070.426.493.000,00	1.070.426.493.000,00	-	1.070.426.493.000,00	-	100,00
4 2 2 01 01	Dana Alokasi Umum	1.070.426.493.000,00	1.070.426.493.000,00	-	1.070.426.493.000,00	-	100,00
4 2 3	DANA ALOKASI KHUSUS	467.790.015.000,00	450.106.719.017,00	4.474.421.600,00	454.581.140.617,00	(13.208.874.383,00)	97,18
4 2 3 01 01	Dana Alokasi Khusus	183.736.000.000,00	178.423.666.465,00	4.474.421.600,00	182.898.088.065,00	(837.911.935,00)	99,54
4 2 3 01 01	Dana Alokasi Khusus	183.736.000.000,00	178.423.666.465,00	4.474.421.600,00	182.898.088.065,00	(837.911.935,00)	99,54
4 2 3 02	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	284.054.015.000,00	271.683.052.552,00	-	271.683.052.552,00	(12.370.962.448,00)	95,64
4 2 3 01 02	Tunjangan Profesi Guru PNSD	222.801.305.000,00	213.581.551.590,00	-	213.581.551.590,00	(9.219.753.410,00)	95,86
4 2 3 01 03	Tambahan Penghasilan Guru PNSD	1.662.000.000,00	498.600.000,00	-	498.600.000,00	(1.163.400.000,00)	30,00
4 2 3 01 05	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	14.815.800.000,00	14.145.600.000,00	-	14.145.600.000,00	(670.200.000,00)	95,48
4 2 3 01 06	Bantuan Operasional Kesehatan	25.311.733.000,00	30.532.952.962,00	-	30.532.952.962,00	5.221.219.962,00	120,63
4 2 3 01 08	Akreditasi Puskesmas	3.750.000.000,00	-	-	-	(3.750.000.000,00)	-
4 2 3 01 09	Jaminan Persalinan	2.610.242.000,00	-	-	-	(2.610.242.000,00)	-
4 2 3 01 10	Bantuan Operasional Keluarga Berencana	7.469.790.000,00	7.423.982.000,00	-	7.423.982.000,00	(45.808.000,00)	99,39
4 2 3 01 13	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	2.068.757.000,00	1.935.978.000,00	-	1.935.978.000,00	(132.779.000,00)	93,58
4 2 3 01 14	Tunjangan Khusus Guru	3.564.388.000,00	3.564.388.000,00	-	3.564.388.000,00	-	100,00
4 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	502.079.114.000,00	458.156.819.919,00	30.884.845.756,00	489.041.665.675,00	(13.037.448.325,00)	97,40
4 3 1	PENDAPATAN HIBAH	91.765.615.000,00	68.887.440.000,00	15.601.729.245,00	84.489.169.245,00	(7.276.445.755,00)	8,57
4 3 1 01	Pendapatan Hibah dari Pemerintahan	1.979.415.000,00	-	169.550.500,00	169.550.500,00	(1.809.864.500,00)	8,57
4 3 1 01 01	Pemerintah	1.979.415.000,00	-	169.550.500,00	169.550.500,00	(1.809.864.500,00)	8,57
4 3 1 06	Hibah Dana BOS	89.786.200.000,00	68.887.440.000,00	15.432.178.745,00	84.319.618.745,00	(5.466.581.255,00)	93,91
4 3 1 06 01	Hibah Dana BOS	89.786.200.000,00	68.887.440.000,00	15.432.178.745,00	84.319.618.745,00	(5.466.581.255,00)	93,91
4 3 3	DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROP. & PEMERINTAH LAINNYA	74.983.000.000,00	63.191.094.719,00	8.919.492.066,00	72.110.586.785,00	(2.872.413.215,00)	96,17
4 3 3 01	Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi	74.983.000.000,00	63.191.094.719,00	8.919.492.066,00	72.110.586.785,00	(2.872.413.215,00)	96,17
4 3 3 01 01	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor ( P K B )	14.000.000.000,00	12.107.166.519,00	2.841.492.846,00	14.948.659.365,00	948.659.365,00	106,78
4 3 3 01 03	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ( BBN - KB )	13.000.000.000,00	8.230.584.462,00	2.179.405.795,00	10.409.990.257,00	(2.590.009.743,00)	80,08
4 3 3 01 05	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ( PBB - KB )	21.000.000.000,00	16.805.067.754,00	3.891.576.597,00	20.696.644.351,00	(303.355.649,00)	98,56
4 3 3 01 06	Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah APT / ABT	83.000.000,00	43.550.099,00	7.016.828,00	50.566.927,00	(32.433.073,00)	60,92
4 3 3 01 08	Bagi Hasil dari Pajak Rokok	26.900.000.000,00	26.004.725.885,00	-	26.004.725.885,00	(895.274.115,00)	96,67

KODE REKENING	U R A I A N	TARGET	REALISASI			SELISIH	%
			S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8
4 3 4	DANA PENYESUAIAN & OTONOMI KHUSUS	307.386.499.000,00	306.620.285.200,00	-	306.620.285.200,00	(766.213.800,00)	99,75
4 3 4 01	Dana Penyesuaian	307.386.499.000,00	306.620.285.200,00	-	306.620.285.200,00	(766.213.800,00)	99,75
4 3 4 01 01	Dana Bantuan Operasional Sekolah ( BOS )		-		-	-	#DIV/0!
4 3 4 01 05	Dana Insentif Daerah	17.500.000.000,00	17.500.000.000,00		17.500.000.000,00	-	100,00
4 3 4 01 09	Dana Desa	289.886.499.000,00	289.120.285.200,00		289.120.285.200,00	(766.213.800,00)	99,74
4 3 5	BANTUAN KEUANGAN DARI PROP. / PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	27.944.000.000,00	19.458.000.000,00	6.363.624.445,00	25.821.624.445,00	(2.122.375.555,00)	92,40
4 3 5 01	Bantuan Keuangan dari Provinsi	27.944.000.000,00	19.458.000.000,00	6.363.624.445,00	25.821.624.445,00	(2.122.375.555,00)	92,40
4 3 5 01 01	Bantuan Keuangan dari Provinsi	2.000.000.000,00		2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	-	100,00
4 3 5 01 02	Bantuan Pendidikan Gratis				-	-	
4 3 5 01 02	Bantuan Kesehatan Gratis	25.944.000.000,00	19.458.000.000,00	4.363.624.445,00	23.821.624.445,00	(2.122.375.555,00)	91,82
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	89.295.314.008,57	89.272.749.508,57	22.564.500,00	89.295.314.008,57	0,00	100,00
	KEGIATAN LANJUTAN	59.295.314.008,57	59.272.749.508,57	22.564.500,00	59.295.314.008,57	0,00	100,00
	Sisa Kas Tahun 2018 ( Saldo Awal )		47.195.922.310,57		47.195.922.310,57		
	Sisa Kas di Bend. Pengeluaran Tahun 2017		90.933.477,00	22.564.500,00	113.497.977,00		
	Saldo Kas di BLUD Tahun 2017		4.304.209.202,00		4.304.209.202,00		
	Sisa Kas di Bendahara JKN Tahun 2017		4.932.265.206,00		4.932.265.206,00		
	Sisa Kas Di Dana BOS 2017		2.749.419.313,00		2.749.419.313,00		
	Pencairan Dana Cadangan	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00		30.000.000.000,00		
	Pencairan Dana Cadangan	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00		30.000.000.000,00		
	Pencairan Dana Cadangan nomor	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00		30.000.000.000,00		
	PENERIMAAN PIUTANG DAERAH	1.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000.000,00	
	Penerimaan piutang daerah dari pendapatan daerah	1.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000.000,00	
	Penerimaan piutang daerah dari Lain - lain pendapatan daerah	1.500.000.000,00	0,00		0,00	-1.500.000.000,00	
	PENERIMAAN		711.700.495,67	1.938.459.171,86	2.650.159.667,53		
	PENGEMBALIAN DANA 2018 ( KONTRA POS )		711.700.495,67	1.938.459.171,86	2.650.159.667,53		
	JUMLAH PENERIMAAN	2.359.451.900.654,57	2.285.308.005.893,35	58.235.027.362,16	2.343.543.033.255,51	(15.908.867.399,06)	99,33



**REALISASI PENERIMAAN PAD KHUSUS YANG DIKELOLA BAPENDA KAB. BONE  
KEADAAN S/D 31 DESEMBER 2018**

NO.	JENIS PAJAK DAN RETRIBUSI	TARGET	REALISASI PENERIMAAN			%	SELISIH	KETERANGAN
			S/D BULAN LALU	TGL 02 - 31 DES	JUMLAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PAJAK HOTEL	457.700.567,00	581.334.352,00	52.707.550,00	634.041.902,00	138,53	176.341.335,00	
2	PAJAK RESTORAN	1.439.030.000,00	2.717.821.685,00	547.744.206,00	3.265.565.891,00	226,93	1.826.535.891,00	
3	PAJAK HIBURAN	181.000.000,00	178.097.430,00	18.323.650,00	196.421.080,00	108,52	15.421.080,00	
4	PAJAK REKLAME	416.300.000,00	757.070.675,00	7.146.250,00	764.216.925,00	183,57	347.916.925,00	
5	PAJAK PENERANGAN JALAN	18.942.337.000,00	19.588.746.332,00	1.911.569.147,00	21.500.315.479,00	113,50	2.557.978.479,00	
6	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	400.000.000,00	279.998.925,00	120.425.271,00	400.424.196,00	100,11	424.196,00	
7	PAJAK AIR TANAH	52.637.600,00	94.680.980,00	9.518.000,00	104.198.980,00	197,96	51.561.380,00	
8	PAJAK SARANG BURUNG WALET	10.000.000,00	15.900.000,00	6.600.000,00	22.500.000,00	225,00	12.500.000,00	
9	<b>PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN</b>	<b>15.727.789.000,00</b>	<b>16.137.244.240,02</b>	<b>1.041.288.453,98</b>	<b>17.178.532.694,00</b>	<b>109,22</b>	<b>1.450.743.694,00</b>	
	- SEKTOR PERDESAAN	9.747.930.979,00	10.785.888.075,02	648.924.046,00	11.434.812.121,02	117,31	1.686.881.142,02	
	- SEKTOR PERKOTAAN	5.979.858.021,00	5.351.356.165,00	392.364.407,98	5.743.720.572,98	96,05	(236.137.448,02)	
10	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH dan BANGUNAN	4.010.000.000,00	6.729.236.718,00	441.030.592,00	7.170.267.310,00	178,81	3.160.267.310,00	
11	<b>RETRIBUSI PASAR</b>	<b>2.416.818.000,00</b>	<b>1.980.362.500,00</b>	<b>178.744.500,00</b>	<b>2.159.107.000,00</b>	<b>89,34</b>	<b>(257.711.000,00)</b>	
	- PASAR SENTRAL WATAMPONE	510.844.000,00	345.267.500,00	31.710.500,00	376.978.000,00	73,80	(133.866.000,00)	
	- PASAR INPRES DAN NON INPRES	1.905.974.000,00	1.635.095.000,00	147.034.000,00	1.782.129.000,00	93,50	(123.845.000,00)	
12	RET. PASAR GROSIR / PERTOKOAN	46.656.000,00	70.944.000,00	8.832.000,00	79.776.000,00	170,99	33.120.000,00	
13	<b>RET. PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH</b>	<b>171.113.000,00</b>	<b>97.300.000,00</b>	<b>10.500.000,00</b>	<b>107.800.000,00</b>	<b>63,00</b>	<b>(63.313.000,00)</b>	
	- PEMAKAIAN RUMAH DAERAH	50.000.000,00	53.300.000,00	6.500.000,00	59.800.000,00	119,60	9.800.000,00	
	- PEMAKAIAN BTC	121.113.000,00	44.000.000,00	4.000.000,00	48.000.000,00	39,63	(73.113.000,00)	
14	RET. TEMPAT KHUSUS PARKIR	15.000.000,00	18.572.000,00	1.728.000,00	20.300.000,00	135,33	5.300.000,00	
	<b>JUMLAH</b>	<b>44.286.381.167,00</b>	<b>49.247.309.837,02</b>	<b>4.356.157.619,98</b>	<b>53.603.467.457,00</b>	<b>121,04</b>	<b>9.283.966.290,00</b>	

**REALISASI PENERIMAAN PAD YANG DIKELOLA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KAB. BONE  
KEADAAN S/D 31 DESEMBER 2018**

NO.	INSTANSI PENGELOLA / JENIS PENDAPATAN	TARGET	REALISASI PENERIMAAN			%	KETERANGAN
			BULAN LALU	BULAN INI	JUMLAH		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.</b>	<b>BADAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>44.286.381.167,00</b>	<b>49.247.309.837,02</b>	<b>4.356.157.619,98</b>	<b>53.603.467.457,00</b>	<b>121,04</b>	
A.	PAJAK HOTEL	457.700.567,00	581.334.352,00	52.707.550,00	634.041.902,00	138,53	
B.	PAJAK RESTORAN	1.439.030.000,00	2.717.821.685,00	547.744.206,00	3.265.565.891,00	226,93	
C.	PAJAK HIBURAN	181.000.000,00	178.097.430,00	18.323.650,00	196.421.080,00	108,52	
D.	PAJAK REKLAME	416.300.000,00	757.070.675,00	7.146.250,00	764.216.925,00	183,57	
E.	PAJAK PENERANGAN JALAN	18.942.337.000,00	19.588.746.332,00	1.911.569.147,00	21.500.315.479,00	113,50	
F.	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	400.000.000,00	279.998.925,00	120.425.271,00	400.424.196,00	100,11	
G.	PAJAK AIR TANAH	52.637.600,00	94.680.980,00	9.518.000,00	104.198.980,00	197,96	
H.	PAJAK SARANG BURUNG WALET	10.000.000,00	15.900.000,00	6.600.000,00	22.500.000,00	225,00	
I.	<b>PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN</b>	<b>15.727.789.000,00</b>	<b>16.137.244.240,02</b>	<b>1.041.288.453,98</b>	<b>17.178.532.694,00</b>	<b>109,22</b>	
	- SEKTOR PERDESAAN	9.747.930.979,00	10.785.888.075,02	648.924.046,00	11.434.812.121,02	117,31	
	- SEKTOR PERKOTAAN	5.979.858.021,00	5.351.356.165,00	392.364.407,98	5.743.720.572,98	96,05	
J.	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH dan BANGUNAN	4.010.000.000,00	6.729.236.718,00	441.030.592,00	7.170.267.310,00	178,81	
K.	<b>RETRIBUSI PELAYANAN PASAR</b>	<b>2.416.818.000,00</b>	<b>1.980.362.500,00</b>	<b>178.744.500,00</b>	<b>2.159.107.000,00</b>	<b>89,34</b>	
	RET. PASAR ( PASAR SENTRAL WTP )	510.844.000,00	345.267.500,00	31.710.500,00	376.978.000,00	73,80	
	RET. PASAR (PSR.INPRES DAN NON INPRES)	1.905.974.000,00	1.635.095.000,00	147.034.000,00	1.782.129.000,00	93,50	
L.	RETRIBUSI PASAR GROSIR / PERTOKOAN	46.656.000,00	70.944.000,00	8.832.000,00	79.776.000,00	170,99	
M.	<b>RET. PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH</b>	<b>171.113.000,00</b>	<b>97.300.000,00</b>	<b>10.500.000,00</b>	<b>107.800.000,00</b>	<b>63,00</b>	
	- PEMAKAIAN RUMAH DAERAH	50.000.000,00	53.300.000,00	6.500.000,00	59.800.000,00	119,60	
	- PEMAKAIAN BTC	121.113.000,00	44.000.000,00	4.000.000,00	48.000.000,00	39,63	
N.	RET. TEMPAT KHUSUS PARKIR	15.000.000,00	18.572.000,00	1.728.000,00	20.300.000,00	135,33	
<b>2.</b>	<b>DINAS PERHUBUNGAN</b>	<b>789.006.000,00</b>	<b>815.675.000,00</b>	<b>64.763.000,00</b>	<b>880.438.000,00</b>	<b>111,59</b>	
A.	RET. PARKIR DITEPI JALAN UMUM	405.766.000,00	522.000.000,00	41.658.000,00	563.658.000,00	138,91	
B.	RET. PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	164.520.000,00	149.300.000,00	15.780.000,00	165.080.000,00	100,34	
C.	RET. TERMINAL	200.000.000,00	127.335.000,00	5.845.000,00	133.180.000,00	66,59	
D.	RET. TEMPAT KHUSUS PARKIR	5.520.000,00	4.750.000,00	390.000,00	5.140.000,00	93,12	
E.	RET. PELAYANAN KEPELABUHANAN	7.200.000,00	4.600.000,00	850.000,00	5.450.000,00	75,69	
F.	RET. IZIN TRAYEK	6.000.000,00	7.690.000,00	240.000,00	7.930.000,00	132,17	
G.	LAIN - LAIN PAD YG SAH ( PARTISIPASI PIHAK KE TIGA )		-	-	-		
<b>3.</b>	<b>DINAS PETERNAKAN</b>	<b>1.250.000.000,00</b>	<b>1.082.068.500,00</b>	<b>136.686.500,00</b>	<b>1.218.755.000,00</b>	<b>97,50</b>	
A.	RET. RUMAH POTONG HEWAN	150.000.000,00	104.510.000,00	11.255.000,00	115.765.000,00	77,18	
B.	RET. TEMPAT PELELANGAN	1.100.000.000,00	977.558.500,00	125.431.500,00	1.102.990.000,00	100,27	
<b>4.</b>	<b>DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>	<b>295.000.000,00</b>	<b>163.110.000,00</b>	<b>28.750.000,00</b>	<b>191.860.000,00</b>	<b>65,04</b>	
A.	RET. PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH (SEWA ALAT BERAT)	140.000.000,00	129.400.000,00	25.000.000,00	154.400.000,00	110,29	
B.	LAIN-LAIN PAD YG SAH	15.000.000,00	13.500.000,00	3.750.000,00	17.250.000,00	115,00	
C.	RET. PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI	125.000.000,00	-	-	-	-	
D.	PARTISIPASI PIHAK KE TIGA	15.000.000,00	20.210.000,00		20.210.000,00	134,73	

NO.	INSTANSI PENGELOLA / JENIS PENDAPATAN	TARGET	REALISASI PENERIMAAN			%	KETERANGAN
			BULAN LALU	BULAN INI	JUMLAH		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>5</b>	<b>DINAS PERINDUSTRIAN</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>21.420.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>28.420.000,00</b>	<b>113,68</b>	
	A. RET. PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA	200.000,00	440.000,00		440.000,00	220,00	
	B. LAIN-LAIN PAD YG SAH ( PARTISIPASI PIHAK KETIGA )	24.800.000,00	20.980.000,00	7.000.000,00	27.980.000,00		
			-				
<b>6</b>	<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	<b>229.050.000,00</b>	<b>191.912.000,00</b>	<b>42.540.000,00</b>	<b>234.452.000,00</b>	<b>102,36</b>	
	A. RET. JASA USAHA TEMPAT PELELANGAN	153.050.000,00	128.065.000,00	25.040.000,00	153.105.000,00	100,04	
	B. RET. PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH	26.000.000,00	21.500.000,00	4.500.000,00	26.000.000,00	100,00	
	C. RET. PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH	50.000.000,00	42.000.000,00	13.000.000,00	55.000.000,00	110,00	
	D. RET. IZIN USAHA PERIKANAN		347.000,00	-	347.000,00		
			-				
<b>7.</b>	<b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b>	<b>4.600.000.000,00</b>	<b>4.456.819.350,00</b>	<b>447.145.850,00</b>	<b>4.903.965.200,00</b>	<b>106,61</b>	
	A. RET. IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN	4.600.000.000,00	4.456.819.350,00	447.145.850,00	4.903.965.200,00	106,61	
			-				
<b>8.</b>	<b>DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA</b>	<b>90.000.000,00</b>	<b>114.990.538,00</b>	<b>16.620.585,00</b>	<b>131.611.123,00</b>	<b>146,23</b>	
	A. RET. TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA	90.000.000,00	114.990.538,00	16.620.585,00	131.611.123,00	146,23	
			-				
<b>9.</b>	<b>DINAS KESEHATAN</b>	<b>11.024.570.712,00</b>	<b>6.842.919.914,00</b>	<b>1.305.577.182,00</b>	<b>8.148.497.096,00</b>	<b>73,91</b>	
	A. RET. PELAYANAN KESEHATAN	11.024.570.712,00	6.842.919.914,00	1.305.577.182,00	8.148.497.096,00	73,91	
			-				
<b>10.</b>	<b>DINAS PARIWISATA</b>	<b>800.000.000,00</b>	<b>679.651.000,00</b>	<b>84.700.000,00</b>	<b>764.351.000,00</b>	<b>95,54</b>	
	A. RET. TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA	800.000.000,00	679.651.000,00	84.700.000,00	764.351.000,00	95,54	
			-				
<b>11.</b>	<b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>225.000.000,00</b>	<b>206.650.000,00</b>	<b>23.350.000,00</b>	<b>230.000.000,00</b>	<b>102,22</b>	
	A. RET. PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN	225.000.000,00	206.650.000,00	23.350.000,00	230.000.000,00	102,22	
			-				
<b>12.</b>	<b>DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN,HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN</b>	<b>99.800.000,00</b>	<b>32.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>32.000.000,00</b>	<b>32,06</b>	
	A. LAIN-LAIN PAD YG SAH ( PARTISIPASI PIHAK KETIGA )	99.800.000,00	32.000.000,00		32.000.000,00	32,06	

NO.	INSTANSI PENGELOLA / JENIS PENDAPATAN	TARGET	REALISASI PENERIMAAN			%	KETERANGAN
			BULAN LALU	BULAN INI	JUMLAH		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>13.</b>	<b>DINAS PEMADAM KEBAKARAN</b>	<b>12.925.000,00</b>	<b>5.370.000,00</b>	<b>9.100.000,00</b>	<b>14.470.000,00</b>	<b>111,95</b>	
	A. RET. PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN	12.925.000,00	5.370.000,00	9.100.000,00	14.470.000,00	111,95	
			-				
<b>14.</b>	<b>BADAN LAYANAN UMUM DAERAH ( RSUD )</b>	<b>71.695.241.000,00</b>	<b>62.680.563.223,00</b>	<b>8.704.222.684,00</b>	<b>71.384.785.907,00</b>	<b>99,57</b>	
	A. LAIN-LAIN PENDAPATAN BLUD	71.175.007.000,00	62.125.288.223,00	8.655.646.684,00	70.780.934.907,00	99,45	
	B. RET. TEMPAT KHUSUS PARKIR	520.234.000,00	555.275.000,00	48.576.000,00	603.851.000,00	116,07	
			-				
<b>15.</b>	<b>BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH</b>	<b>64.050.863.900,00</b>	<b>67.146.431.623,09</b>	<b>5.332.712.174,32</b>	<b>72.479.143.797,41</b>	<b>113,16</b>	
	A. BAGIAN LABA ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSDA/BUMD		-				
	- PERUSAHAAN DAERAH	36.469.000,00	-		-	-	
	- LEMBAGA KEUANGAN DAERAH	7.055.937.600,00	7.055.937.640,00		7.055.937.640,00	100,00	
	B. HASIL PENJUALAN ASSET DAERAH YANG TIDAK DIPISAHKAN		-				
	- PENJUALAN KENDARAAN DINAS RODA DUA	-	-		-		
	- PENJUALAN KENDARAAN DINAS RODA EMPAT	262.830.800,00	-		-	-	
	C. PENJUALAN LODS PASAR RUKO ( PASAR SENTRAL)	1.190.000.000,00	632.416.232,00	77.379.835,00	709.796.067,00	59,65	
	D. PEMBAYARAN RUKO PASAR LAMA EKS PASAR SENTRAL		12.000.000,00		12.000.000,00		
	E. PENERIMAAN JASA GIRO	6.000.000.000,00	6.449.962.426,46	718.091.568,42	7.168.053.994,88	119,47	
	F. PEND. DENDA ATAS KETERLAMBATAN PEL. PEKERJAAN	100.000.000,00	208.933.661,00	-	208.933.661,00	208,93	
	G. PENDAPATAN DARI PENGEMBALIAN	600.000.000,00	724.738.319,33	28.771.200,50	753.509.519,83	125,58	
	H. LAIN - LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	8.600.000.000,00	9.900.019.592,30	50.935.164,40	9.950.954.756,70	115,71	
	I. DANA KAPITASI JKN PADA PUSKESMAS	40.205.626.500,00	42.162.423.752,00	4.457.534.406,00	46.619.958.158,00	115,95	
<b>JUMLAH</b>		<b>199.472.837.779,00</b>	<b>193.686.890.985,11</b>	<b>20.559.325.595,30</b>	<b>214.246.216.580,41</b>	<b>107,41</b>	